

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung tentunya tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan penduduk, serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan sehingga hampir semua sektor tumbuh terpusat di Bandar Lampung. Selain itu, banyaknya kendaraan yang melintasi kota Bandar Lampung menyebabkan kemacetan sehingga mengganggu kenyamanan lalu lintas. Akan tetapi, hal tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga menyebabkan kesemrawutan dan mengganggu keindahan kota.

Kawasan Perkotaan Bandar Lampung merupakan kawasan strategis provinsi dan lintas kabupaten/kota yang penataan ruangnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Perkembangan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung yang semakin pesat menuju Kawasan Metropolitan memerlukan kesiapan penataan ruang karena akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap penataan ruang nasional. Maka pada dasarnya kawasan perkotaan Bandar Lampung berpotensi sebagai embrio kawasan metropolitan, yang harus diantisipasi sejak dini arah dan pengembangannya melalui penataan ruang, untuk menghindari pertumbuhan menjadi kota besar yang tidak terkendali dengan

segala inefisiensi dan dampak negatifnya, menjadi kawasan metropolitan yang terencana.

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan daya tampung lahan yang terbatas sangat mempengaruhi kualitas lingkungan terutama di perkotaan. Akibat pertumbuhan kawasan perkotaan terjadi kerusakan mangrove, alih fungsi lahan pada hutan yang berperan sebagai *catcment area* kawasan perkotaan, abrasi pantai dan kerusakan ekosistem pesisir. Kualitas lingkungan di pusat kota semakin menurun sehingga tidak kondusif untuk investasi yang dapat mendorong ekonomi perkotaan.

Secara kewilayahan, Bandar Lampung dinilai sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai ibukota Provinsi Lampung karena mengalami permasalahan yang serius yang harus segera di atasi, sedangkan daerah-daerah di luar Bandar Lampung masih memiliki tempat yang memungkinkan untuk dikembangkan. Daerah-daerah pinggiran kota tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan dapat membantu mengalihkan pertumbuhan penduduk di kota Bandar Lampung.

Dewasa ini Pemerintah Provinsi Lampung membuat Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung untuk mengurangi kepadatan penduduk di Kota Bandar Lampung dan membantu mengembangkan wilayah sekitar kota. Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung Pasal 29 menyebutkan bahwa kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Lampung dan fasilitas

pendukung lainnya ditetapkan di Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung.

Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Lampung mengalihkan lokasi lahan Kota Baru Lampung Ke Jati Agung, Lampung Selatan. Lahan PTPN VIII Natar yang akan dijadikan area perkantoran sejauh ini masih tarik ulur dan menunggu persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN). Pengalihan lokasi Kota Baru Lampung menurut sumber (dalam situs <http://www.radarlampung.co.id/web/metropolis/bandarlampung/3464-kota-baru-tanpa-mal.html>) berdasarkan hasil foto udara yang menyebutkan lahan milik PTPN VII Unit Kedaton masih sangat strategis untuk pembangunan Kota Baru Lampung. Sedangkan Natar dinilai sudah terlalu padat penduduknya. Selain itu, arus lalu lintas di Natar secara perlahan mengalami peningkatan dari sisi jumlah kendaraan.

Berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-747/MBU/2009 tanggal 16 Oktober 2009 Perihal Persetujuan Pemanfaatan Lahan PTPN VII Unit Usaha Kedaton yang direncanakan sebagai Kota Baru Lampung yang akan dibangun pada lahan PTPN VII Unit Usaha Kedaton yang berada di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan seluas 1.669 ha dari jumlah keseluruhan 3.252,90 ha.

Peletakan batu pertama yang menjadi titik awal dari pembangunan Kota Baru Lampung telah dilakukan pada tanggal 27 Juni 2010 oleh Gubernur Lampung Sjachroedin ZP yang berlokasi di Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kota Baru Lampung dengan konsep Green City, Modern

City dengan motto “Inspirasi Masa Depan” akan menjadi pusat pemerintahan baru Provinsi Lampung dan juga menjadi pusat aktifitas masyarakat Lampung.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. Berlian Tihang (dalam situs <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:letHINTO5TIJ:www.seruit.com/a/index.php/kategori/41-berita/898-peletakan-batu-pertama-kotabarulampung+lokasilampung+lokasi+pembangunan+kota+baru+lampung&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>) pengembangan kawasan Kota Baru Lampung akan meliputi empat kecamatan, yaitu Jati Agung, Natar, Sukarame, dan Tanjung Bintang.

Menurut sumber (dalam situs <http://www.radarlampung.co.id/web/berita-foto/8468-menelusuri-bentangan-jalur-impian-kota-baru-natar-jatiagung.html>) dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung membuat perubahan sikap para pemilik tanah di Kecamatan Jati Agung dan Natar. Para pemilik tanah rela tersingkir ke pedalaman desa demi menjual tanahnya dengan harga yang tinggi.

Disamping itu, perubahan penempatan lahan Kota Baru yang sebelumnya berlokasi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dipindahkan ke Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Menurut sumber (dalam situs <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=46607911>) menyayangkan rencana Pemerintah Provinsi Lampung yang semula akan menjadikan Natar sebagai Kota Baru Lampung, menjadikan masyarakat yang ada di wilayah Natar kecewa dengan perubahan yang sebelumnya sudah

dijanjiikan oleh Gubernur Lampung, karena masyarakat Desa Natar sangat antusias terhadap rencana pembangunan Kota Baru di wilayah Natar.

Selain itu, dalam Skripsi Reny Angelina Bachsan (2009:10) mengatakan “ Bahwa ada perwakilan buruh PTPN VII yang menyampaikan aspirasinya agar Pihak PTPN VII membatalkan perjanjian “tukar guling: lahan perkebunan seluas 5000 ha tersebut. Kelompok buruh PTPN VII tersebut menilai bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung menyebabkan sekitar 1500 orang yang bekerja sebagai buruh perkebunan akan kehilangan mata pencaharianya, serta mereka juga mencemaskan kelak alih fungsi lahan ini menyebabkan bencana, karena selama ini perkebunan karet dan kelapa sawit tersebut merupakan daerah resapan air”.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “Sikap Politik Masyarakat Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Jati Agung Dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Komponen-Komponen Sikap Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung?
2. Bagaimana Sikap Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Komponen Pembentuk dan Sikap Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.
2. Untuk Mengetahui Saran dan Usul Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan wacana pemikiran bagi studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak terkait khususnya masyarakat Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mengenai sikap politik mereka terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Serta bagaimana saran dan usul mereka terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sikap Politik

Menurut Saifuddin Azwar (2007:5) sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud disini adalah kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada stimulus yang menghendaki adanya respon. Sedangkan menurut Mar'at dalam Abu Ahmadi (1991:161) sikap merupakan kesiapan bereaksi terhadap obyek lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap obyek tersebut. Secara umum sikap adalah kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif, setuju atau tidak setuju terhadap obyek (orang, lembaga, ide dan lain-lain) atau situasi secara konsisten.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, bahwa pada dasarnya sikap merupakan keadaan dalam diri manusia yang dapat menggerakkan seseorang untuk bertindak terhadap objek tertentu yang sifatnya positif atau negatif, setuju atau tidak setuju.

Selanjutnya menurut Sudijono Sastroatmodjo (1995:4) sikap politik dapat dinyatakan sebagai :

”Kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Sikap politik yang ditunjukkan seseorang berupa perasaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju yang didasarkan oleh pengalaman,

pengetahuan, perasaan yang diorganisir oleh individu mengenai objek atau situasi yang menjadi perhatiannya, yang akan mempengaruhi respon seseorang dalam memberikan tanggapan terhadap suatu objek”.

Sedangkan menurut Alpian dalam Leny Sumarya (2005:14) sikap dan tingkah laku politik adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak (diam juga merupakan sikap) terhadap situasi atau keadaan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap politik merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut.

Selanjutnya, sikap politik erat kaitannya dengan sosialisasi politik. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (2005:22) sosialisasi politik yang merupakan proses, oleh pengaruh mana seorang individu dapat mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat-sifat persepsinya mengenai politik, serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik yang mencakup sikap politik serta penilaiannya terhadap politik yang melibatkan pengetahuan, pengalaman, kepribadian.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (1999:117) sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung seumur hidup, yang diperoleh seumur hidup baik sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak

dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses pembentukan sikap politik serta penilaiannya terhadap politik yang melibatkan pengetahuan, pengalaman, kepribadian yang diperoleh seumur hidup baik melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat.

a. Komponen Sikap Politik

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik atau suatu objek politik, Almond dan Verba dalam Sudijono Sastroatmodjo (1998:37-38) mengungkapkan tiga komponen, yaitu :

1. Kognitif

Melalui komponen ini kita dapat melihat pengetahuan seseorang terhadap jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya.

2. Afektif

Berbicara tentang perasaan warga negara terhadap sistem politik tertentu yang membuatnya menerima ataupun menolak sistem politik tersebut secara keseluruhan. Keluarga dan lingkungan hidup seseorang, pada umumnya berpengaruh terhadap pembentukan perasaan individu yang bersangkutan terhadap aspek-aspek politik.

3. Evaluatif

Pada komponen ini orientasi politik seseorang ditentukan oleh evaluasi moral yang telah dimiliki seseorang. Dalam hal ini norma-norma yang di anut akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap kehadiran sistem politik, norma-norma yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen sikap politik terdiri dari komponen kognitif, komponen afektif dan komponen evaluatif. Komponen kognitif berkaitan dengan persepsi, kepercayaan, pandangan (opini) atau pengetahuan yang dimiliki individu mengenai suatu objek politik. Komponen afektif berkaitan dengan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosional, seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan kepada objek-objek tertentu. Dan komponen evaluatif berkaitan dengan penilaian terhadap objek tertentu yang bersifat politik.

b. Sikap Politik Masyarakat

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh masyarakat agar kebijakan tersebut menjadi efektif. Ada tiga bentuk sikap individu atau masyarakat terhadap suatu objek politik atau kebijakan. Menurut Anderson dalam Irfan Islamy (2003:110-112), dan Robert Dahl dalam Arifin Rahman (2002:53-54) mengungkapkan tiga bentuk sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan atau suatu objek politik, yaitu :

1. Mendukung

Komponen ini menjelaskan sebab-sebab mengapa setiap anggota masyarakat perlu mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan atau mengapa masyarakat mendukung suatu kebijakan sehingga pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan efektif meliputi :

- **Respek anggota masyarakat terhadap otoritas atau keputusan-keputusan badan pemerintah**

Sejak lahir manusia telah dididik untuk patuh dan memberikan respek kepada otoritas orangtua, pengetahuan, kedudukan, undang-undang atau hukum, pejabat-pejabat pemerintah dan sebagainya, terutama bila hal ini dianggap beralasan atau masuk akal. Konsekuensinya kita telah terdidik untuk secara moral bahwa mematuhi undang-undang atau hukum itu sebagai hal yang benar atau tepat.

- **Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang serta dibuat melalui prosedur yang benar**

Bila suatu kebijakan itu dibuat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka masyarakat cenderung mempunyai kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut.

- **Adanya kepentingan pribadi**

Seseorang atau sekelompok orang sering memperoleh keuntungan yang langsung dengan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan, karena kebijakan itu sesuai dengan kepentingan pribadinya.

2. Menolak

Komponen menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mengapa orang tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan atau mengapa masyarakat menolak suatu kebijakan yang dapat menghambat jalannya suatu kebijakan meliputi :

- **Kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat**

Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara tajam dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu, maka kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan atau dipatuhi.

- **Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok**

Seseorang bisa patuh atau tidak patuh pada peraturan perundang-undangan atau kebijakan karena keterlibatannya dalam keanggotaan atau suatu perkumpulan yang kadang-kadang mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan yang tidak sesuai atau

bertentangan dengan hukum atau keinginan pemerintah. Akibatnya akan cenderung tidak patuh atau melawan peraturan kebijakan.

- **Adanya ketidakpastian hukum**

Tidak adanya kepastian hukum, ketidakjelasan ukuran kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain dan sebagainya dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan.

3. Tidak Peduli

Pada komponen ini menjelaskan beberapa alasan mengapa orang bersikap tidak peduli terhadap politik atau kebijakan meliputi :

- **Orang merasa tidak melihat perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya.**
- **Seseorang cenderung kurang peduli terhadap suatu kebijakan jika ia merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat mengubah hasilnya dengan jelas**
- **Jika pengetahuan seseorang tentang kebijakan terlalu terbatas**

B. Tinjauan Tentang Penduduk

Menurut sumber (dalam situs <http://farson20.wordpress.com/arti-definisipengertian-negara-dan-fungsi-negarapengertian-warga-negarapengertian-bangsa-dan-pengertian-penduduk-menurut-para-ahli>) dalam Ilmu Sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu. Sedangkan menurut sumber (dalam situs <http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk>) penduduk atau warga suatu negara atau daerah dapat didefinisikan menjadi dua yaitu :

- Orang yang tinggal di daerah tersebut;
- Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, atau dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk adalah sekumpulan manusia yang tinggal di daerah tertentu dan secara hukum memiliki bukti kewarganegaraan untuk berhak tinggal di daerah tersebut.

C. Tinjauan Tentang Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata *policy* biasanya sering dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Menurut Syarief Makhya (2006:78) secara etimologis, kata *policy* berasal dari kata *Polis* dalam bahasa Yunani yang berarti negara kota. Dalam bahasa Latin berubah menjadi *politia* artinya negara. Menurut Carl J.Friedrick dalam Irfan Islamy (2003:17) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai :

” a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose” (serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Anderson dalam Solichin Abdul Wahab (2004:3) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kebijakan atau kebijaksanaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu persoalan yang sedang dihadapi saat ini.

a. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik ditandai dengan banyak hal, oleh karena itu Anderson dalam Budi Winarno (2002:18) mengemukakan ciri-ciri kebijakan publik yaitu :

- Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- Kebijakan publik mungkin berbentuk positif mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif kebijakan publik akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah, tindakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif kemungkinan merupakan keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerinatah justru dibutuhkan.

b. Komponen-Komponen Kebijakan

Komponen-komponen kebijakan menurut Charles O Jones dalam Yufendra (2005:25) yaitu :

- 1) *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
- 2) *Plans* proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.

- 3) Program, merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan.
- 4) *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 5) Efek, merupakan akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Berdasarkan proposal Kota Baru Lampung yang dikemukakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 Kegiatan pemerintahan Provinsi Lampung terletak di Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya akan di pindahkan ke Kecamatan Jati Agung dalam kawasan Kota Baru Lampung. Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pembangunan kota baru yang dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam kesatuan ruang wilayah provinsi.

Pembangunan Kota Baru Lampung dimaksudkan untuk melayani kegiatan pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, serta kegiatan berbagai usaha ekonomi, pariwisata dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya. Pengembangan Kota Baru Lampung akan menempati lokasi lahan Perkebunan PTPN VII (Persero) yang meliputi lahan Unit Usaha Kedaton di Kecamatan Tanjung Bintang yang setelah dimekarkan menjadi Kecamatan Jati Agung seluas 1.669 Ha.

1. Arahan Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung

Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 Kegiatan pemerintahan Provinsi Lampung terletak di Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya akan di pindahkan ke Tanjung Bintang dan sekarang menjadi Jati Agung dalam kawasan Kota baru Lampung. Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pembangunan kota baru yang dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam kesatuan ruang wilayah provinsi. Pembangunan kota baru dimaksudkan untuk melayani kegiatan pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, serta kegiatan berbagai usaha ekonomi, pariwisata dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya.

Pengembangan Kota Baru Lampung direncanakan menempati lokasi lahan Perkebunan PTPN VII (Persero) yang meliputi lahan Unit Usaha Kedaton di Kecamatan Tanjung Bintang dan sekarang menjadi Kecamatan Jati Agung.

HGU : No. 2 Tgl. 9 Mei 1997
Luas Lahan : 3.252,90 Ha
Masa berlaku : 31 Desember 2030

Luas awal pengembangan yang telah disepakati mencapai 1.669 Ha. Secara administrasi lokasi Unit Usaha tersebut berada di Kecamatan Tanjung Bintang yang setelah dimekarkan menjadi Kecamatan Jati Agung. Terkait dengan hal tersebut, akan dilakukan MOU antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PTPN VII (Persero). Adapun konsep yang akan dikembangkan adalah Kota Baru Mandiri dengan desain *Garden City*. Kota baru mandiri adalah kota yang dibangun diatas suatu lahan atau kawasan kosong dalam skala besar, sehingga memungkinkan untuk memenuhi semua aktivitas dan kebutuhannya sendiri. Kota baru mandiri dikembangkan sebagai bagian dari suatu sistem perkotaan.

2. Maksud dan Tujuan Pembangunan Kota Baru Lampung

Pengembangan Kota Baru Lampung dibangun untuk membantu mengembangkan wilayah sekitar kota dan mengurangi beban kota induk. Diharapkan kota baru mandiri dapat menopang Kota Bandar Lampung sebagai kota induk, dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, berwawasan pembangunan dan lingkungan (*sustainable development*) yang asri dan lestari. Pengembangan Kota Baru Lampung yang meliputi lahan seluas 1.669 Ha dapat dikembangkan menjadi 5.000-6.000 Ha pada masa mendatang, rencana dilaksanakan dalam jangka

waktu pelaksanaan selama 30 tahun. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar terhadap perkembangan kawasan perkotaan Bandar Lampung khususnya dan Provinsi Lampung umumnya. Kegiatan ini memerlukan investasi yang besar baik oleh sektor swasta maupun pemerintah.

3. Strategi Pengembangan Metropolitan Bandar Lampung

1. Pendekatan konversi lingkungan (ruang terbuka hijau dan danau untuk peresapan air).
2. Mengoptimalkan/efisiensi ruang dikota Bandar Lampung.
3. Mengalihkan pertumbuhan pada kota baru dan kawasan di luar kota Bandar Lampung.
4. Menciptakan peluang investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja baru
5. Stimulasi pembangunan melalui penyediaan infrastruktur dasar (jalan kota, jalan tol, bandara, energi dan telokomunikasi).
6. Pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi ke kota baru yang terintegrasi dengan pengembangan pemukiman dan kawasan komersial.

4. Rencana Kebutuhan Fungsi Ruang

Secara umum kawasan pembangunan Kota Baru Lampung meliputi :

- **Kawasan Pusat Pemerintahan dan Perumahan Jabatan**

Kawasan pemerintahan ini merupakan relokasi pusat pemerintahan lama Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung ke Tanjung Bintang yang sekarang berubah menjadi Kecamatan Jati Agung, yang terdiri dari perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, kantor DPRD Prov.Lampung dan Perkantoran Instansi Vertikal di Provinsi Lampung berikut perumahan jabatan bagi pejabatnya yang difungsikan sebagai generator bagi pertumbuhan kawasan.

- **Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa (*Central Bisnis Distric*)**

Jenis kegiatan dan jasa yang akan dikembangkan didalam kawasan kota baru adalah kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Kegiatan perdagangan dan jasa dikonsentrasikan berkembang di Pusat Kawasan dan ditunjang oleh kegiatan ekonomi skala lokal di beberapa pusat permukiman.

- **Kawasan Permukiman**

Untuk mendukung pengembangan aktifitas perkotaan yang semakin kompleks dan kebutuhan kawasan penunjang CBD, maka kawasan permukiman sangat diperlukan dan dapat menjadi generator bagi kawasan sekitarnya. Terbagi menjadi 3 tipe hunian mulai dari rumah tipe kecil, sedang, besar/mewah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tema lingkungan binaannya.

- **Kawasan Pelayanan Kesehatan**

Sebagai kawasan terpadu, Kota Baru Lampung harus mempunyai kemampuan pelayanan dibidang kesehatan. Keberadaan rumah sakit modern bertaraf internasional mutlak dibutuhkan. Keberadaan sarana kesehatan ini dapat menjadi generator perkembangan kegiatan kota lainnya.

- **Kawasan Pendidikan dan Olah Raga (*Sport Hall*)**

Untuk mendukung pengembangan aktifitas perkotaan yang semakin kompleks, kawasan pendidikan dan olah raga dapat meningkatkan kreativitas masyarakat serta menjadi sarana interaksi antar masyarakat.

- **Kawasan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota / *Wetlands***

Sebagai kawasan yang memiliki banyak fungsi (*mix use*) terutama kegiatan perkotaan, maka Kota Baru Lampung membutuhkan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer area*) untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan (polusi udara).

- **Kawasan Industri dan Pergudangan**

Salah Kawasan Industri Lampung eksisting di sekitar kawasan perencanaan adalah di Tanjung Bintang sekarang Jati Agung yang mempunyai skala pelayanan regional.

- **Kawasan Pelayanan Transportasi / Transit**

Sebagai simpul dari pergerakan lalu lintas orang dan barang, Kota Baru Lampung memerlukan sarana kantong parkir dan terminal lokal. Lokasi ini dikonsentrasikan pada kawasan dengan mobilitas tinggi.

5. Arahan Pengembangan Kawasan Kota Baru Lampung

Kota Baru Lampung diarahkan sebagai Kota Mandiri yang berperan sebagai kutub-kutub pembangunan wilayah pinggirannya (*hinterland*). Kondisi fisik geografis wilayah perencanaan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kota sesuai dengan fungsinya. Kondisi alamiah kawasan dikembangkan dengan tidak menghilangkan unsur dan tata lingkungan yang ada. Pengaturan lokasi setiap elemen didasarkan pada kriteria-kriteria lokasi dan hubungan fungsional kegiatan, baik kegiatan dalam wilayah perencanaan maupun kegiatan yang berada di wilayah sekitarnya. Besaran ruang disesuaikan dengan daya dukung lahan, jenis kegiatan, jaringan jalan yang menjadi orientasinya dan arahan kepadatan yang ditetapkan dalam peraturan atau kebijakan terkait.

Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan ruang dalam kawasan perencanaan maka beberapa langkah yang diperlukan antara lain :

- Membentuk dan menumbuhkan tata kegiatan baru yang menjadi dampak terhadap perkembangan kawasan serta berfungsi menunjang fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan regional.
- Mengembangkan fasilitas-fasilitas baru yang mendukung potensi kawasan yang akan menjadi pusat pertumbuhan skala regional.
- Melakukan pengelompokkan kegiatan yang sejenis, sehingga dapat dihindari kerugian akibat jenis aktivitas berbeda.
- Memberikan ruang untuk pedagang kaki lima (sektor informal) sehingga dapat dibina untuk dijadikan sebagai suatu potensi kawasan sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial di lingkungan permukiman. Kegiatan-kegiatan utama (*primer*) yang di kembangkan dalam kawasan perencanaan tetap akan mengacu

kepada arahan dan program pembangunan Provinsi Lampung serta mempertimbangkan potensi wilayah, maka arahan pemanfaatan ruang Kota Baru Lampung.

D. Tinjauan Tentang Sikap Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

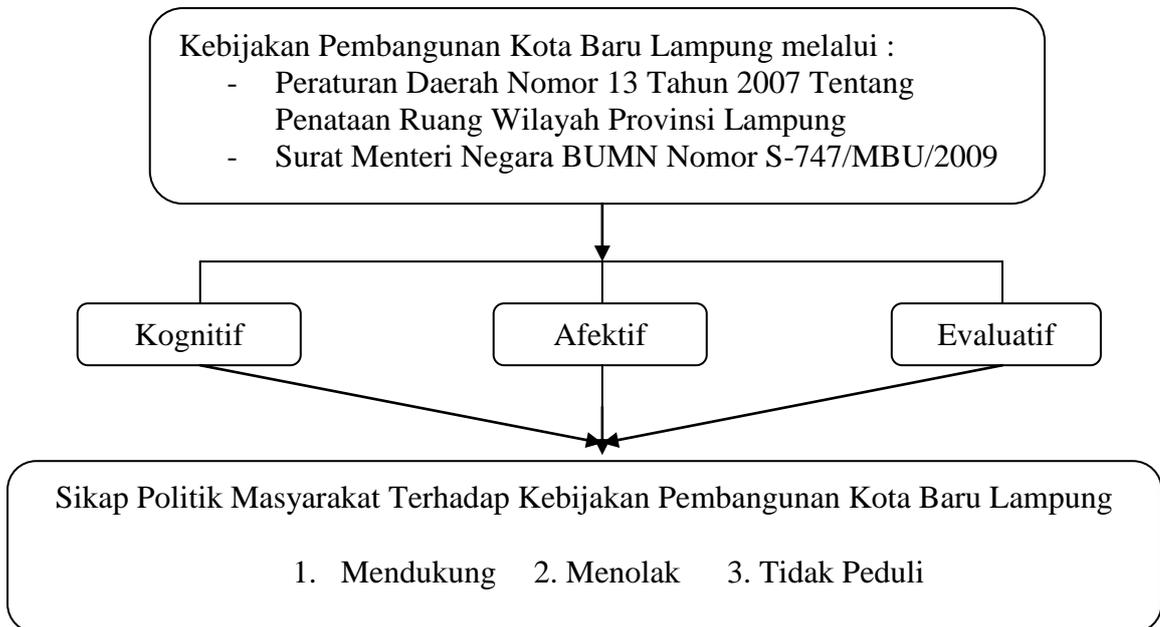
Sikap politik masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung merupakan kecenderungan masyarakat untuk bertindak terhadap objek tertentu yakni kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung yang berupa mendukung (setuju), menolak (tidak setuju, atau tidak peduli (acuh) yang dipengaruhi oleh pengetahuan, perasaan maupun penilaian masyarakat terhadap suatu objek yakni Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

E. Kerangka Pikir

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung Pasal 29 menyebutkan bahwa kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Lampung dan fasilitas pendukung lainnya ditetapkan di Kecamatan Natar dan Kecamatan Jati Agung. Serta Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-747/MBU/2009 tanggal 16 Oktober 2009 Perihal Persetujuan Pemanfaatan Lahan PTPN VII Unit Usaha Kedaton yang menjadi lokasi Kota Baru Lampung. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka akan menimbulkan suatu bentuk sikap dari masyarakat di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Sikap politik masyarakat tersebut dibentuk oleh tiga komponen yaitu, komponen kognitif berupa pengetahuan masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, komponen afektif berisi tentang perasaan masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, serta komponen evaluatif yang akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Dari ketiga komponen tersebut, menimbulkan tiga bentuk sikap yaitu mendukung (Setuju), menolak (Tidak Setuju), atau tidak peduli (Acuh).

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Winarno Surachmad dalam Cholid Narbuko Abu Achmadi (2009:44) yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data menganalisis dan menginterpretasi. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan-kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Menurut Hadari Nawawi (1991:150) penelitian kuantitatif adalah sebuah penyajian analisis dari fenomena yang disusun dengan kata-kata kuantitatif serta membuat ketepatan pengukurannya dengan menggunakan metode statistik sebagai alat ukurnya. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moeloeng (2001:3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan saran dan usul masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pembatasan pengertian tentang hal-hal yang perlu diamati. Mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Komponen sikap politik yakni beberapa faktor yang mempengaruhi sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik atau suatu objek politik yang berhubungan dengan komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen evaluatif yang dimiliki seseorang.
2. Sikap politik merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut, dan sikap politik tersebut dapat berupa mendukung, menolak, ataupun tidak peduli terhadap suatu objek tertentu.
3. Saran dan usul masyarakat berupa maksud/tujuan, program, evaluasi, serta dampak dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dipandang penting, karena dengan adanya fokus penelitian akan membatasi studi. Menurut Miles dan Huberman (1992:60) memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi. Jadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap politik masyarakat Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dan bagaimana saran dan usul masyarakat Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

D. Definisi Operasional

Menurut M. Nazir (1999:152) menyatakan bahwa, definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Secara operasional sikap politik masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung merupakan keadaan dalam diri manusia untuk memberikan reaksi yang berupa penerimaan, penolakan, ketidak pedulian dari masyarakat Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terhadap suatu objek yakni Kebijakan Pembangunan Kota baru Lampung yang dipengaruhi oleh komponen kognitif, afektif maupun evaluatif.

a. Komponen-Komponen Sikap Politik

• **Komponen Kognitif, diukur melalui :**

- 1) Pengetahuan masyarakat mengenai lokasi Pembangunan Kota Baru Lampung.
- 2) Pengetahuan masyarakat mengenai alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.
- 3) Pengetahuan masyarakat mengenai maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung
- 4) Pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.
- 5) Pengetahuan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

• **Komponen Afektif, diukur melalui :**

- 1) Perasaan masyarakat terhadap lokasi Pembangunan Kota Baru Lampung.
- 2) Perasaan masyarakat terhadap alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.
- 3) Perasaan masyarakat terhadap maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.
- 4) Perasaan masyarakat terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

5) Perasaan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

- **Komponen Evaluatif, diukur melalui :**

1) Penilaian masyarakat terhadap lokasi Pembangunan Kota Baru Lampung.

2) Penilaian masyarakat terhadap alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

3) Penilaian masyarakat terhadap maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

4) Penilaian masyarakat terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

6) Penilaian masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

b. Sikap Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

- **Sikap mendukung, diukur dari :**

1) Respek masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

2) Adanya keyakinan bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dibuat secara sah oleh pemerintah yang berwenang, serta dibuat melalui prosedur yang benar.

3) Adanya kepentingan pribadi yang diperoleh dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

- **Sikap Menolak, diukur dari :**

1) Kebijakan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung bertentangan dengan sistem nilai masyarakat.

2) Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok yang bertentangan ide kelompoknya dengan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

3) Adanya ketidakpastian hukum dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

- **Sikap Tidak Peduli, diukur dari :**

1) Orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

2) Seseorang cenderung kurang peduli terhadap suatu kebijakan jika merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat mengubah hasilnya dengan jelas.

3) Jika pengetahuan seseorang mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung terlalu terbatas.

c. Saran dan Usul Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

- 1) Saran dan usul masyarakat terhadap lokasi pembangunan Kota Baru Lampung.
- 2) Saran dan usul masyarakat terhadap alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.
- 3) Saran dan usul masyarakat terhadap maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.
- 4) Saran dan usul masyarakat tentang manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.
- 5) Harapan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun alasan penentuan lokasi ini adalah disesuaikan dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui sikap politik masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yang berhubungan dengan ke dua kecamatan tersebut.

F. Populasi Penelitian

Menurut Komaruddin dalam Mardalis (2009:53) yang dimaksud dengan populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Berdasarkan hasil survey, didapatkan jumlah populasi penduduk Kecamatan Jati Agung secara keseluruhan berjumlah 97.445 jiwa dan didapatkan sebanyak 67.346 orang yang berusia 17 tahun atau orang yang sudah menikah berdasarkan data rekapitulasi PilPres tahun 2009 pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang di ambil dari 21 desa meliputi : desa Way Huwi, desa Jati Mulyo, desa Fajar Baru, desa Karang Anyar. desa Marga Agung, desa Marga Kaya, desa Margo Lestari, desa Margodadi, desa Sinar Rezeki, desa Sidodadi Asri, desa Gedung Agung, desa Margorejo, desa Karang Rejo, desa Karang Sari, desa Sidoharjo, desa Rejo Mulyo, desa Banjar Agung, desa Gedung Harapan, desa Margo mulyo, desa Sidoharjo, desa Sumber Jaya.

Sedangkan populasi penduduk Kecamatan Natar secara keseluruhan berjumlah 155.973 jiwa, dan didapatkan 109.969 orang yang berusia 17 tahun atau orang yang sudah menikah berdasarkan data rekapitulasi PilPres tahun 2009 pada Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang di ambil dari 22 desa meliputi : desa Hajimena, desa Pemanggilan, desa Candimas, desa Bumi Sari, desa Natar, desa Merak Batin, desa Rejosari, desa Tanjung Sari, desa Branti Raya, desa Mandah, desa Sidosari, desa Tanjung Sari, desa Haduyang, desa Rulung Raya, desa Rulung Helok, desa Pancasila, desa

Negara Ratu, desa Krawang Sari, desa Banjar Negeri, desa Muara Putih, desa Bandar Rejo, desa Purwosari, desa Sukadamai.

Jadi jumlah populasi pada dua kecamatan di atas adalah 177.315 orang.

G. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui menurut Yamane dalam Riduwan (2004: 65) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Banyaknya sampel

N = Jumlah populasi

d = Nilai Presisi (0,10)

Maka dengan menggunakan rumus tersebut banyaknya sampel adalah :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

$$n = \frac{177.315}{177.315(0.1)^2 + 1}$$

$$n = 99,94$$

Dibulatkan menjadi 100 orang.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa responden yang telah diteliti sebanyak 100 orang pada penduduk Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *proportional area random sampling*, yaitu sampel yang diambil di kecamatan sebanding dengan banyaknya sub populasi di setiap desa/kelurahan, dengan rumus :

$$Nh = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan :

Nh : banyaknya sampel dari setiap kelompok

n : jumlah sampel yang mewakili populasi

Ni : banyaknya sub populasi

N : jumlah populasi

Moh. Musa dan Titi Nurfitri (1988:85)

Desa-desa di Kecamatan Jati Agung meliputi :

$$1. \text{ Desa Way Huwi} \quad : Nh = \frac{8.019}{177.315} \times 100 = 4,52 = 5 \text{ orang}$$

$$2. \text{ Desa Jati Mulyo} \quad : Nh = \frac{9.732}{177.315} \times 100 = 5,48 = 5 \text{ orang}$$

$$3. \text{ Desa Fajar Baru} \quad : Nh = \frac{3.556}{177.315} \times 100 = 2,00 = 2 \text{ orang}$$

$$4. \text{ Desa Karang Anyar} \quad : Nh = \frac{8.263}{177.315} \times 100 = 4,66 = 5 \text{ orang}$$

$$5. \text{ Desa Marga Agung} \quad : Nh = \frac{2.817}{177.315} \times 100 = 1,58 = 2 \text{ orang}$$

6. Desa Marga Kaya : $Nh = \frac{1.994}{177.315} \times 100 = 1,12 = 1$ orang
7. Desa Margo Lestari : $Nh = \frac{1.707}{177.315} \times 100 = 0,96 = 1$ orang
8. Desa Margodadi : $Nh = \frac{1.900}{177.315} \times 100 = 1,07 = 1$ orang
9. Desa Sinar Rezeki : $Nh = \frac{4.618}{177.315} \times 100 = 2,60 = 3$ orang
10. Desa Sidodadi Asri : $Nh = \frac{3.414}{177.315} \times 100 = 1,92 = 2$ orang
11. Desa Gedung Agung : $Nh = \frac{1.030}{177.315} \times 100 = 0,58 = 1$ orang
12. Desa Margorejo : $Nh = \frac{1.260}{177.315} \times 100 = 0,71 = 1$ orang
13. Desa Karang Rejo : $Nh = \frac{3.110}{177.315} \times 100 = 1,75 = 2$ orang
14. Desa Karang Sari : $Nh = \frac{2.576}{177.315} \times 100 = 1,45 = 2$ orang
15. Desa Sidoharjo : $Nh = \frac{1.815}{177.315} \times 100 = 1,02 = 1$ orang
16. Desa Rejo Mulyo : $Nh = \frac{3.668}{177.315} \times 100 = 2,00 = 2$ orang
17. Desa Banjar Agung : $Nh = \frac{1.474}{177.315} \times 100 = 0,83 = 1$ orang
18. Desa Gedung Harapan : $Nh = \frac{352}{177.315} \times 100 = 0,19 = 0$ orang

$$19. \text{ Desa Margo Mulyo} \quad : Nh = \frac{1.880}{177.315} \times 100 = 1,06 = 1 \text{ orang}$$

$$20. \text{ Desa Sidoharjo} \quad : Nh = \frac{1.815}{177.315} \times 100 = 1,02 = 1 \text{ orang}$$

$$21. \text{ Desa Sumber Jaya} \quad : Nh = \frac{2.714}{177.315} \times 100 = 0,53 = 1 \text{ orang}$$

Desa-desa di Kecamatan Natar, meliputi :

$$1. \text{ Desa Hajimena} \quad : Nh = \frac{8.951}{177.315} \times 100 = 5,04 = 5 \text{ orang}$$

$$2. \text{ Desa Pemanggilan} \quad : Nh = \frac{4.424}{177.315} \times 100 = 2,49 = 2 \text{ orang}$$

$$3. \text{ Desa Bumi Sari} \quad : Nh = \frac{5.014}{177.315} \times 100 = 2,80 = 3 \text{ orang}$$

$$4. \text{ Desa Candimas} \quad : Nh = \frac{7.618}{177.315} \times 100 = 4,29 = 4 \text{ orang}$$

$$5. \text{ Desa Natar} \quad : Nh = \frac{11.181}{177.315} \times 100 = 6,30 = 6 \text{ orang}$$

$$6. \text{ Desa Merak Batin} \quad : Nh = \frac{12.785}{177.315} \times 100 = 7,21 = 7 \text{ orang}$$

$$7. \text{ Desa Rejosari} \quad : Nh = \frac{2.551}{177.315} \times 100 = 1,43 = 1 \text{ orang}$$

$$8. \text{ Desa Tanjung Sari} \quad : Nh = \frac{5.511}{177.315} \times 100 = 3,10 = 3 \text{ orang}$$

$$9. \text{ Desa Branti Raya} \quad : Nh = \frac{6.372}{177.315} \times 100 = 3,59 = 4 \text{ orang}$$

10. Desa Mandah : $Nh = \frac{2.730}{177.315} \times 100 = 1,53 = 2$ orang
11. Desa Sidosari : $Nh = \frac{2.652}{177.315} \times 100 = 1,49 = 1$ orang
12. Desa Haduyang : $Nh = \frac{3.945}{177.315} \times 100 = 2,22 = 2$ orang
13. Desa Rulung Raya : $Nh = \frac{3.466}{177.315} \times 100 = 1,95 = 2$ orang
14. Desa Rulung Helok Helok : $Nh = \frac{5322}{177.315} \times 100 = 3,00 = 3$ orang
15. Desa Pancasila : $Nh = \frac{1939}{177.315} \times 100 = 1,09 = 1$ orang
16. Desa Negara Ratu : $Nh = \frac{6897}{177.315} \times 100 = 3,88 = 4$ orang
17. Desa Krawang Sari : $Nh = \frac{2618}{177.315} \times 100 = 1,40 = 1$ orang
18. Desa Banjar Negeri : $Nh = \frac{3154}{177.315} \times 100 = 1,77 = 2$ orang
19. Desa Muara Putih : $Nh = \frac{3573}{177.315} \times 100 = 2,01 = 2$ orang
20. Desa Bandar Rejo : $Nh = \frac{2398}{177.315} \times 100 = 1,3 = 1$ orang
21. Desa Purwosari : $Nh = \frac{2249}{177.315} \times 100 = 1,26 = 1$ orang
22. Desa Sukadamai : $Nh = \frac{4529}{177.315} \times 100 = 2,55 = 3$ orang

Total sampel pada dua kecamatan di atas berjumlah 100 orang.

Selanjutnya digunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dengan persyaratan :

1. Subjek berusia diatas 17 tahun atau orang yang sudah menikah.
2. Subjek berdomisili di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
3. Subjek cukup mengerti mengenai kebijakan pembangunan kota baru Lampung
4. Subjek tidak buta huruf
5. Subjek punya cukup waktu untuk dimintai informasi

H. Sumber Data

Sumber data pada pelaksanaan penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumber data dilapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dan wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka sebagai landasan teori dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian dan data mengenai penelitian ini.

I. Penentuan Informan

Pada penelitian ini informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam wawancara adalah masyarakat Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang dipilih dengan sengaja dengan tujuan tertentu. Menurut Spreadley dan Faisal (1990:78) agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang dipertimbangkan yaitu :

- 1) Subjek berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah
- 2) Subjek yang berada atau tinggal di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang mengetahui Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.
- 3) Subyek yang mempunyai cukup banyak informasi dan waktu untuk dimintai keterangan.

Untuk itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1). Kepala Desa Way Huwi Bpk. Asnawi
- 2). Kepala desa Karang Anyar Bpk. Suparmin
- 3). Masyarakat Kecamatan Jati Agung yakni Bpk. Marsudi, Bpk. Muhibin, dan Bpk. Wasito.

J. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik kuesioner/angket

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Teknik kuesioner ini ditujukan untuk mendapatkan data dari masyarakat Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada lima informan yakni Kepala Desa Way Huwi Bpk. Asnawi, Kepala Desa Karang Anyar Bpk. Suparmin, dan masyarakat Kecamatan Jati Agung yakni Bpk. Marsudi, Bpk. Muhibin, dan Bpk. Wasito.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berasal dari pihak lain berupa undang-undang, buku, surat kabar dan berbagai sumber lainnya yang berupa informasi dan dokumen yang berhubungan dengan lokasi penelitian dan masalah penelitian.

K. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul tidak langsung dianalisis, tetapi lebih dulu diperiksa kembali dengan tujuan apakah data yang terkumpul tersebut mempunyai kekurangan maupun kesalahan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian.

Tahap-tahap tersebut adalah :

1. Tahap editing

Yaitu proses melakukan pemeriksaan atau pengecekan data yang terkumpul dari lapangan, yaitu meliputi kelengkapan jawaban yang di dapat dari lapangan dan kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya.

2. Tahap koding

Yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori dengan memberi tanda atau kode.

3. Tahap tabulasi

Yaitu tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa secara teratur dan sistematis.

4. Tahap intepretasi data

Yaitu tahap mengintepretasikan data penelitian yang telah dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

5. Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses pemecahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi.

6. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian Data (*display data*) dibatasi sebagai kumpulan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis berdasarkan pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.

7. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

L. Teknik Analisis Data

Menurut Sofian Effendi dan Chris Manning dalam Masri Singarimbun (1995:263) analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Analisis data yang dipergunakan bersifat kuantitatif deskriptif, dengan penggunaan tabel tunggal dan tabel silang.

Sedangkan proses analisis data menggunakan Skala Likert. Menurut Sugiyono (2009:93) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, pendapat seseorang dalam melihat fenomena sosial. Tersedia lima alternatif pilihan jawaban dengan skor 5,4,3,2,1 untuk pernyataan positif sedangkan pernyataan negatif skornya 1,2,3,4,5.

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rumus persentase menurut Soerjono Soekanto (1986:268) sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase

F : Frekuensi pada klasifikasi kategori yang bersangkutan

N : Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Sedangkan untuk penentuan batas interval menurut Sutrisno Hadi (1986: 45)

digunakan rumus :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Intervensi nilai skor

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

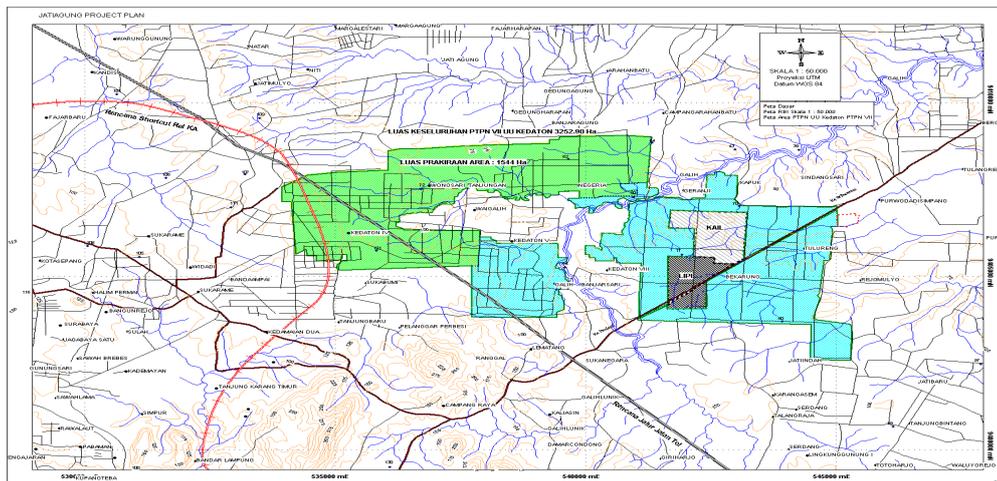
K = Kategori jawaban

IV. GAMBARAN UMUM KOTA BARU LAMPUNG

A. Lokasi Kota Baru Lampung

Pembangunan Kota Baru Lampung menempati lokasi lahan PT. Perkebunan Nusantara VII yang berlokasi di Kecamatan Jati Agung dan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam kawasan pengembangan Kota Baru Lampung. Adapun peta kawasan pembangunan Kota Baru Lampung dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

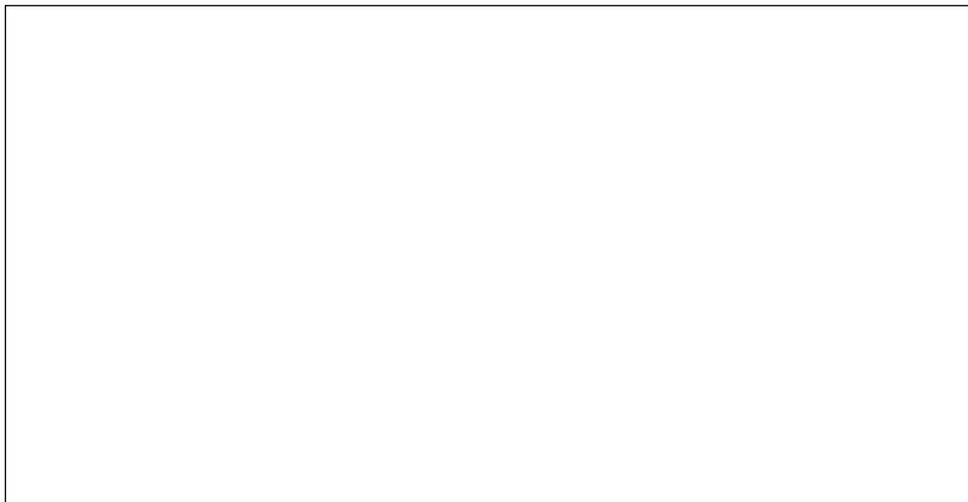
Gambar 2
Peta kawasan terpilih seluas 1.669 Ha
Unit Usaha Kedaton Kec. Jati Agung
Kab. Lampung Selatan



Sumber : Proposal Kota Baru Lampung

Berdasarkan Proposal Kota Baru Lampung sesuai Arahannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 kegiatan Pemerintahan Provinsi Lampung yang terletak di Kota Bandar Lampung, selanjutnya akan di pindahkan ke Tanjung Bintang dan sekarang menjadi Jati Agung dalam kawasan Kota baru Lampung. Arahannya pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pembangunan kota baru yang dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam kesatuan ruang wilayah provinsi. Pembangunan kota baru dimaksudkan untuk melayani kegiatan pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, serta kegiatan berbagai usaha ekonomi, pariwisata dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya.

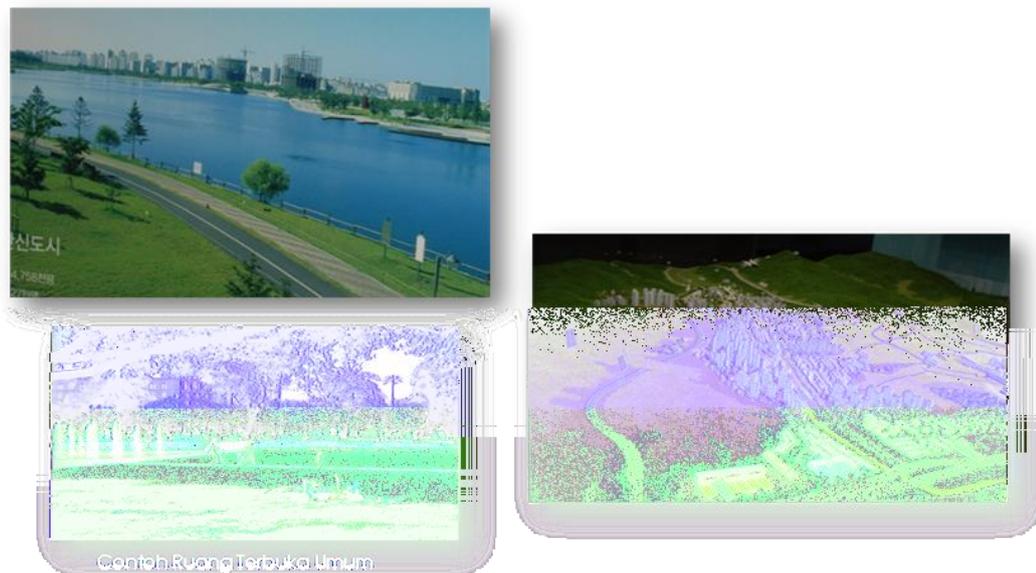
Gambar 3
Unit Usaha Rejosari Kec. Natar
Kab. Lampung Selatan



Sumber : Proposal Kota Baru Lampung

Luas awal pengembangan yang telah disepakati mencapai 1.669 Ha. Secara administrasi lokasi unit usaha tersebut berada di Kecamatan Jati Agung. Terkait dengan hal tersebut, akan dilakukan MOU antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PTPN VII (Persero).

Gambar 4
Contoh Kota Baru Lampung



Sumber : Proposal Kota Baru Lampung

B. Monografi Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar

1. Kecamatan Jati Agung

Letak Geografis Kecamatan Jati Agung seluas 267,84 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur
- Sebelah Selatan : Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
- Sebelah Barat : Kab. Lampung Timur

- Sebelah Timur : Kec. Natar Kab.Lampung Selatan

Kecamatan Jati Agung memiliki 21 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 97.445 pada tahun 2009, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah Desa dan Penduduk Kecamatan Jati Agung

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas (Ha)
1.	Way Huwi	14.380	483
2.	Jati Mulyo	10.822	884
3.	Banjar Agung	3.826	556
4.	Gedung Harapan	574	465
5.	Gedung Agung	1.610	533
6.	Margo Mulyo	2.955	701
7.	Sidodadi Asri	1.964	1297
8.	Purwotani	10.422	1002
9.	Sumber Jaya	3.826	1117
10.	Margodadi	2.527	675
11.	Margo Lestari	3.405	1011
12.	Marga Agung	2.892	1050
13.	Marga Kaya	2.397	510
14.	Sinar Rejeki	5.285	2210
15.	Sidoharjo	5.285	1004
16.	Rejomulyo	11.379	1200
17.	Karang Anyar	4.602	4810
18.	Fajar Baru	3.407	1100
19.	Karang Sari	3.405	1156
20.	Karang Rejo	4.730	4545
21.	Margo Rejo	1.555	475
Jumlah		97.445	26.784

Sumber : Kecamatan Jati Agung Dalam Angka Tahun 2009

2. Kecamatan Natar

Letak Geografis Kecamatan Natar seluas 250,88 Km², dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran

- Sebelah Timur : Kec. Jati Agung Kab.Lampung Selatan
- Sebelah Selatan : Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung
- Sebelah Barat : Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran

Kecamatan Natar memiliki 22 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 15.973 pada tahun 2009, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Jumlah Desa dan Penduduk Kecamatan Natar

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Luas (Ha)
		Jiwa	%	
1.	Hajimena	11.952	7,66	750
2.	Sidosari	3.362	2,16	297
3.	Pemanggilan	6.520	4,18	500
4.	Natar	14.804	9,49	1615
5.	Krawang Sari	3.768	2,42	1082
6.	Muara Putih	5.167	3,31	685
7.	Merak Batin	19.296	12,37	2787
8.	Negara Ratu	10.422	6,68	1300
9.	Rejosari	4.277	2,74	49,00
10.	Tanjung Sari	7.519	4,82	1100
11.	Bumi Sari	7.063	4,53	301
12.	Candimas	10.363	6,64	1082
13.	Branti Raya	9.624	6,17	1242
14.	Haduyang	5.899	3,78	768
15.	Banjar Negeri	4.804	3,08	285
16.	Pancasila	2.597	1,67	1004
17.	Purwosari	3.029	1,94	1027
18.	Suka Damai	6.165	3,95	1132
19.	Bandar Rejo	3.113	2,00	917
20.	Rulung Raya	4.760	3,05	1007
21.	Rulung Helok	7.131	4,57	631
22.	Mandah	4.337	2,78	7750
Jumlah		15.973	100,00	25.088

Sumber : Kecamatan Natar Dalam Angka Tahun 2009

C. Ide Awal dan Informasi Kelayakan Kota Baru Lampung

Menurut sumber (<http://blog.unila.ac.id/maulana/files/2009/10/28-opini-kota-baru-lampung-di-natar-atau-jati-agung-lampost-18-10.pdf>) pada tahun 2007, Bappeda Provinsi Lampung menyusun Rencana Induk Kota Baru Lampung di Natar. Produk ini kemudian menjadi lampiran dari Perda No. 13/2007 tentang RTRW Provinsi Lampung dan menjadi salah satu program unggulan Gubernur Sjachroedin. Dalam pasal 29 Perda tersebut, terdapat beberapa kawasan tertentu salah satunya adalah arahan untuk membangun pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung yang diarahkan di Kecamatan Natar dan Jatiagung dengan membangun sebuah kota baru. Dalam rencana itu, Kota Baru Lampung akan dibangun dengan konsep *eco-city* (kota berwawasan lingkungan) yang ditawarkan sebagai model struktur ruang dan arsitektural kota baru nantinya.

Pengembangan Kota Baru Lampung awalnya direncanakan menempati lokasi lahan perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara VII yang meliputi lahan unit usaha Rejosari, unit usaha Pematang Kiwah dan unit usaha Kedaton seluas kurang lebih 4.000 ha. Secara administratif, lokasi unit usaha itu berada di Kecamatan Natar dan Kecamatan Jatiagung. Akan tetapi, karena persoalan lahan yang belum mendapatkan kepastian serta kepentingan untuk segera merealisasikan rencana pembangunan Kota Baru Lampung maka lokasi pembangunan Kota Baru Lampung di alihkan ke Jati Agung.

Pemindahan ini terjadi dikarenakan pilihan kota baru yang berlokasi di Natar tidak didukung atas pertimbangan rasional dan persetujuan banyak pihak yang akan terkena dampak (baik positif maupun negatif) dari pembangunan kota baru itu sehingga ke depan akan berpotensi menimbulkan pertanyaan dan negosiasi lanjutan dari banyak pihak seperti misalnya Meneg BUMN/PTPN VII, Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum.

Kompromi dengan Meneg BUMN dilakukan dengan prasyarat awal yakni proses tukar guling lahan PTPN dengan lahan yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di Way Kanan. Departemen Perhubungan juga perlu diajak kompromi atas rencana ini karena Natar termasuk dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) atas keberadaan Bandara Radin Inten II di lokasi tersebut.

Berdasarkan Proposal Kota Baru Lampung oleh Pemerintah Provinsi Lampung pertumbuhan penduduk dan daya tampung lahan kawasan perkotaan Bandar Lampung dengan segala potensinya bagi pengembangan kawasan sekitar, sebagai bagian dari kawasan andalan Bandar Lampung – Metro dan sekitarnya, merupakan salah satu zona investasi dalam pengembangan regional yang memiliki tingkat pertumbuhan kawasan perkotaan yang sangat tinggi, mengarah pada kecenderungan *urban sprawl* dan konurbasi dengan kota-kota satelit di sekitarnya, seperti Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, dan Gedong Tataan.

Maka pada dasarnya kawasan perkotaan Bandar Lampung berpotensi sebagai embrio kawasan metropolitan, yang harus diantisipasi sejak dini arah dan skenario pengembangannya melalui penataan ruang, untuk menghindari pertumbuhan menjadi kota besar yang tidak terkendali dengan segala inefisiensi dan dampak negatifnya, menjadi kawasan metropolitan yang terencana. Selain itu, kemacetan lalu lintas semakin sering terjadi dalam lima tahun terakhir ini, akibat dari penambahan jumlah kendaraan bermotor tidak dapat diimbangi dengan penambahan ruas jalan baru.

Terkait dengan percepatan perkembangan Kota Bandar Lampung, salah satu strategi kebijakan pengembangan perkotaan sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 Kegiatan pemerintahan Provinsi Lampung terletak di Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya akan di pindahkan ke Tanjung Bintang sekarang Jati Agung dalam kawasan Kota Baru Lampung, dengan konsep yang akan dikembangkan adalah Kota Baru Mandiri dengan desain *Garden City*. Kota baru mandiri adalah kota yang dibangun diatas suatu lahan atau kawasan kosong dalam skala besar, sehingga memungkinkan untuk memenuhi semua aktivitas dan kebutuhannya sendiri. Kota baru mandiri dikembangkan sebagai bagian dari suatu sistem perkotaan.

D. Pro Kontra Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat Jati Agung dan Natar. Penggunaan lahan PTPN VII untuk pengembangan Kota Baru Lampung menimbulkan kontra dikalangan buruh PTPN VII. Dalam Skripsi, Reny Angelina Bachsan (2009:10) dikatakan bahwa :

“Kelompok buruh PTPN VII tersebut, menilai bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung menyebabkan sekitar 1500 orang yang bekerja sebagai buruh perkebunan akan kehilangan mata pencahariannya, serta mereka juga mencemaskan kelak alih fungsi lahan ini menyebabkan bencana, karena selama ini perkebunan karet dan kelapa sawit tersebut merupakan daerah resapan air”.

Sedangkan ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan dari adanya kebijakan tersebut, yakni para pemilik tanah rela berpindah kepedalaman demi menjual tanahnya dengan harga yang cukup tinggi.

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung mendapat tanggapan positif maupun negatif dikalangan masyarakat pengembangan Kota Baru Lampung, karena pada akhirnya mereka juga yang akan merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden

Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang semuanya adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Identitas responden dalam penelitian ini ditinjau dari empat segi yaitu jenis kelamin, usia atau umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara umum dapat diketahui jumlah masing-masing responden berdasarkan jenis kelaminnya. Adapun identitas responden menurut jenis kelamin dapat diketahui dari tabel dibawah ini:

Tabel 3 jumlah responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	55	56
2.	Perempuan	45	44
Jumlah		100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa jumlah responden laki-laki berjumlah 55 responden (55%) dan responden perempuan berjumlah 45 responden (45%).

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia atau Umur

Menurut Gabriel Almond dan Sydney Verba dalam Miriam Budiardjo (2001:10) membedakan usia menjadi tiga golongan yaitu :

1. Usia/umur muda (17-35 tahun)
2. Usia/umur muda (36-54 tahun)
3. Usia/umur muda (55 tahun ke atas)

Berdasarkan kriteria di atas dapat diketahui usia responden pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Usia Responden

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	17-35 tahun	41	44
2.	36-54 tahun	39	38
3.	55 tahun ke atas	20	18
Jumlah		100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa usia responden 17-35 tahun sebanyak 41 orang (41%), dan responden yang berusia 36-54 tahun berjumlah 39 orang (39%), dan usia responden 55 tahun ke atas sebanyak 20 orang (20%).

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang akan menambah pengetahuan orang tersebut. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 5 Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD/SR	23	21
2.	SLTP	19	19
3.	SLTA	45	48
4.	Sarjana	13	12
Jumlah		100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 5 di atas terlihat bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 45 orang (45%), SD/SR sebanyak 23 orang (23%), SLTP sebanyak 19 orang (19%), Sarjana sebanyak 13 orang (13%).

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi sikap hidup orang tersebut. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 6 Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tani/Buruh	22	20
2.	Wiraswasta	25	27
3.	Swasta	24	22
4.	Pelajar/Mahasiswa	17	19
5.	PNS	12	12
Jumlah		100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui sebanyak 22 orang (22%) responden bekerja sebagai tani atau buruh, sebanyak 25 orang (25%) responden bekerja sebagai wiraswasta, sebanyak 24 orang (24%) responden bekerja sebagai pegawai swasta, sebanyak 17 orang (17%) responden bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa, sebanyak 12 orang (12%) responden bekerja sebagai Pegawai Negei Sipil.

B. Komponen-Komponen Sikap Politik

a. Dilihat dari komponen Kognitif

Pada komponen ini akan diketahui bagaimana pengetahuan responden mengenai kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung, alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung, maksud atau tujuan dari kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung, manfaat dari adanya kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung, serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung.

1. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 Kegiatan pemerintahan Provinsi Lampung yang terletak di Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya akan di pindahkan ke Tanjung Bintang yang sekarang menjadi Kecamatan Jati Agung dalam kawasan Kota Baru Lampung. Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pembangunan kota baru yang dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam kesatuan ruang wilayah provinsi.

Tabel 7. Distribusi jawaban pengetahuan masyarakat mengenai lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Tahu	5	20	20
	Tahu	4	71	71
	Cukup Tahu	3	8	8
	Tidak Tahu	2	1	1
	Sangat Tidak Tahu	1	0	0
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden mengetahui tentang kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung. Hal tersebut dapat dilihat dari 20 responden (20%) menyatakan sangat tahu, 71 responden (71%) menyatakan mereka mengetahui dengan adanya kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung, 8 responden (8%) menyatakan cukup tahu, dan 1

responden (1%) menyatakan tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut.

Kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung memerlukan sosialisasi dari Pemerintah dengan dukungan berbagai informasi yang ada. Kegiatan pemerintahan Provinsi Lampung yang terletak di Kota Bandar Lampung, selanjutnya akan di pindahkan ke Tanjung Bintang sekarang menjadi Kecamatan Jati Agung dalam kawasan Kota Baru Lampung.

Responden yang menyatakan sangat tahu maupun tahu mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung karena mereka mendapat informasi dari media masa dan adanya isu atau pembicaraan yang ada di masyarakat mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung tersebut. Sedangkan responden yang menjawab tidak tahu dikarenakan kurangnya responden mengikuti perkembangan yang sedang terjadi saat ini mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

2. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Alasan Pemerintah Provinsi Lampung Mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung dikeluarkan karena Pemerintah Provinsi Lampung melihat bahwa Kota Bandar Lampung dinilai sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai ibukota Provinsi Lampung. Berdasarkan proposal Kota Baru Lampung, Kota

Bandar Lampung saat ini mengalami berbagai permasalahan kota yang cukup serius yang harus segera diatasi, yakni pesatnya pertumbuhan penduduk, kemacetan lalu lintas dan daya tampung lahan yang terbatas sangat mempengaruhi kualitas lingkungan terutama di perkotaan.

Akibat pertumbuhan kawasan perkotaan terjadi kerusakan mangrove, alih fungsi lahan pada hutan yang berperan sebagai *catchment area* kawasan perkotaan, abrasi pantai dan kerusakan ekosistem pesisir. Kualitas lingkungan di pusat kota semakin menurun sehingga tidak kondusif untuk investasi yang dapat mendorong ekonomi perkotaan.

Tabel 8. Distribusi jawaban pengetahuan masyarakat mengenai alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
2	Sangat Tahu	5	2	2
	Tahu	4	53	53
	Cukup Tahu	3	35	35
	Tidak Tahu	2	9	9
	Sangat Tidak Tahu	1	1	1
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Tabel 8 di atas, maka dapat diketahui sebanyak 2 responden (2%) menyatakan sangat tahu dengan alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, sebanyak 53 responden (53%) menyatakan tahu dengan alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan

Pembangunan Kota Baru Lampung, sebanyak 35 responden (35%) menyatakan cukup tahu, sebanyak 9 responden (9%) menyatakan tidak tahu dan 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak tahu dengan alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung.

Sebagian besar responden mengetahui alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung. Tetapi, tidak sedikit responden yang menyatakan ragu-ragu atau cukup tahu mengenai alasan dari dikeluarkannya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yakni seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas serta kurangnya ruang terbuka hijau karena kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan baik pemerintahan, perekonomian, pembangunan, yang tidak lepas dari persoalan tersebut.

3. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Maksud Atau Tujuan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Menurut Proposal Kota Baru Lampung disebutkan bahwa pengembangan kota baru ini dibangun untuk membantu mengembangkan wilayah sekitar kota dan mengurangi beban kota induk. Diharapkan kota baru mandiri dapat menopang Kota Bandar Lampung sebagai kota induk, dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, berwawasan pembangunan dan lingkungan (*sustainable development*) yang asri dan lestari. Pengembangan

Kota Baru Lampung yang meliputi lahan seluas 1.669 Ha dapat dikembangkan menjadi 5.000-6.000 Ha pada masa mendatang, rencana dilaksanakan dalam jangka waktu pelaksanaan selama 30 tahun.

Tanggapan responden terhadap maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Distribusi jawaban pengetahuan masyarakat mengenai maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
3	Sangat Tahu	5	2	2
	Tahu	4	57	57
	Cukup Tahu	3	23	23
	Tidak Tahu	2	17	17
	Sangat Tidak Tahu	1	1	1
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 9 di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap maksud atau tujuan dari kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung, yaitu sebanyak 2 responden (2%) menyatakan sangat tahu, 57 responden (57%) menyatakan tahu, 23 responden (23%) menyatakan cukup tahu, 17 responden (17%) menyatakan tidak tahu, dan sisanya 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak tahu maksud atau tujuan dari dikeluarkannya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Sebagian besar responden mengetahui maksud atau tujuan dari dikeluarkannya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yakni untuk mengembangkan daerah pinggiran kota dan tentunya dapat menguntungkan masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung. Sedangkan sebagian kecil responden yang tidak mengetahui maksud atau tujuan dari adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung karena Pemerintah Provinsi Lampung dinilai tidak melibatkan masyarakat dan tidak mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai maksud atau tujuan dari kebijakan tersebut.

4. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Manfaat Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Manfaat dari kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung menurut Proposal Kota Baru Lampung, yakni:

- Pendekatan konservasi lingkungan (ruang terbuka hijau dan danau untuk peresapan air).
- Mengoptimalkan/efisiensi penggunaan ruang di kota Bandar Lampung
- Mengalihkan pertumbuhan pada kota baru dan kawasan baru di luar kota Bandar Lampung (*sharing of growth*).
- Menciptakan peluang investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja baru.
- Stimulasi pembangunan melalui penyediaan infrastruktur dasar (jalan kota, jalan tol, bandara, energi, dan telekomunikasi).
- Pengembangan kawasan Pemerintahan Provinsi ke Kota Baru yang terintegrasi dengan pengembangan permukiman dan kegiatan komersial.

Tanggapan responden terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. Distribusi jawaban pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
4	Sangat Tahu	5	2	2
	Tahu	4	55	55
	Cukup Tahu	3	31	31
	Tidak Tahu	2	10	10
	Sangat Tidak Tahu	1	2	2
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Tabel 10 di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai manfaat dari kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dibidang ekonomi, pembangunan, sosial politik. Hal tersebut terlihat dari sebanyak 2 responden (2%) menyatakan sangat tahu, 55 responden (55%) menyatakan tahu, 31 responden (31%) menyatakan cukup tahu, 10 responden (10%) menyatakan tidak tahu, dan sisanya 2 responden (2%) menyatakan sangat tidak mengetahui manfaat dari kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung.

Sedangkan responden yang menyatakan cukup tahu, tidak tahu bahkan sangat tidak tahu terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dikarenakan Pemerintah

Provinsi Lampung tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga tidak ada kejelasan mengenai hal tersebut.

5. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Berdasarkan Proposal Kota Baru Lampung, Kota Baru Lampung diarahkan sebagai Kota Mandiri yang berperan sebagai kutub-kutub pembangunan wilayah pinggirannya (*hinterland*). Kondisi fisik geografis wilayah kota baru Lampung dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kota sesuai dengan fungsinya. Kondisi alamiah kawasan dikembangkan dengan tidak menghilangkan unsur dan tata lingkungan yang ada.

Penggunaan ruang dalam kawasan Kota Baru Lampung antara lain:

- Membentuk dan menumbuhkan tata kegiatan baru yang menjadi dampak terhadap perkembangan kawasan serta berfungsi menunjang fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan regional
- Mengembangkan fasilitas-fasilitas baru yang mendukung potensi kawasan yang akan menjadi pusat pertumbuhan skala regional.
- Mengembangkan simpul-simpul untuk menumbuhkan pusat kegiatan baru.
- Memberikan ruang untuk pedagang kaki lima (sektor informal) sehingga dapat dibina untuk dijadikan sebagai suatu potensi kawasan sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Mengembangkan kegiatan pelayanan sosial di lingkungan permukiman.

Tanggapan responden mengenai dampak yang akan terjadi dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Distribusi jawaban pengetahuan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
5	Sangat Tahu	5	22	22
	Tahu	4	69	69
	Cukup Tahu	3	7	7
	Tidak Tahu	2	2	2
	Sangat Tidak Tahu	1	0	0
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 22 responden (22%) menyatakan sangat tahu, 69 responden (69%) menyatakan tahu, 7 responden (7%) menyatakan cukup tahu, 2 responden (2%) menyatakan tidak mengetahui mengenai dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Kota Baru Lampung.

Sebagian besar responden mengetahui dampak yang akan terjadi dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung akan mempengaruhi kondisi ekonomi, pembangunan, maupun sosial politik masyarakat setempat. Sedangkan responden yang menjawab tidak mengetahui dampak yang akan terjadi dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru

Lampung dikarenakan responden tersebut kurang memahami mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Selanjutnya untuk mengetahui aspek kognitif masyarakat secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 12. Rekapitulasi Komponen-Komponen Sikap dari Aspek Kognitif

No	Pernyataan	ST	%	T	%	CT	%	TT	%	STT	%	Σ
1.	Pengetahuan Masyarakat Mengenai Lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung	20	20	71	71	8	8	1	1	0	0	100
2.	Pengetahuan Masyarakat Mengenai Alasan Pemerintah Provinsi Lampung Mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	2	2	53	53	35	5	9	9	1	1	100
3.	Pengetahuan Masyarakat Mengenai Maksud atau Tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	2	2	57	57	23	23	17	17	1	1	100

4.	Pengetahuan Masyarakat Mengenai Manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	2	2	55	55	31	31	10	10	2	2	100
5.	Pengetahuan Masyarakat Mengenai Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	22	22	69	69	7	7	2	2	0	0	100
Total		48		305		104		39		4		500

Data Diolah Dari Hasil Penelitian, 2010

Keterangan :

ST : Sangat Tahu

TT : Tidak Tahu

T : Tahu

STT : Sangat Tidak Tahu

CT : Cukup Tahu

Untuk mengetahui persentase komponen-komponen sikap responden dari aspek kognitif digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

F: Frekuensi pada klasifikasi kategori yang bersangkutan

N: Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Berdasarkan tabel 12 di atas diperoleh persentase sebagai berikut :

$$\text{Sangat Tahu (ST)} = \frac{48}{500} \times 100\% = 9,7\%$$

$$\text{Tahu (T)} = \frac{305}{500} \times 100\% = 61\%$$

$$\text{Cukup Tahu (CT)} = \frac{104}{500} \times 100\% = 20,9\%$$

$$\text{Tidak Tahu (TT)} = \frac{39}{500} \times 100\% = 7,9\%$$

$$\text{Sangat Tidak Tahu (STT)} = \frac{4}{500} \times 100\% = 0,8\%$$

Berdasarkan perhitungan persentase di atas dapat diketahui sebanyak 9,7% responden menjawab sangat tahu, 61% responden menjawab tahu, 20,9% responden menjawab cukup tahu, 7,9% responden menjawab tidak tahu, dan sisanya sebanyak 0,8% menjawab sangat tidak tahu mengenai lokasi, alasan, maksud atau tujuan, manfaat, serta dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Berdasarkan komponen kognitif di atas diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui isu yang ada didalam masyarakat, serta diperoleh melalui media cetak. Sedangkan responden yang kurang mengetahui mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti perkembangan

yang terjadi di daerahnya sendiri yang dapat diperoleh melalui media cetak maupun elektronik dan lainnya.

Selanjutnya untuk menganalisis komponen kognitif responden digunakan rumus interval sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Intervensi nilai skor

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori jawaban

Nilai tertinggi (NT) dan nilai terendah (NR) dapat diketahui melalui tabel Rekapitulasi Komponen-Komponen Sikap Responden Berdasarkan Skor Jawaban (terlampir). Diketahui NT = 25 dan NR = 10 dan kategori jawaban (K) ditentukan sebanyak 5. Sehingga nilai interval masing-masing kelas dapat diketahui :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{25 - 10}{5} = 3, \text{ maka dengan demikian dapat ditentukan :}$$

Sangat Tahu ≥ 22

Tahu = 19-21

Cukup Tahu = 16-18

Tidak Tahu = 13-15

Sangat Tidak Tahu = 10-12

Tabel 13. Kategori Komponen Sikap dari Aspek Kognitif

No.	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Tahu	7	7,00
2.	Tahu	55	55,00
3.	Cukup Tahu	28	28,00
4.	Tidak Tahu	6	6,00
5.	Sangat Tidak Tahu	4	4,00
Total		100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Tabel 13 di atas menunjukkan kategori pengetahuan responden menjadi lima kategori yaitu sangat tahu, tahu, cukup tahu, tidak tahu, sangat tidak tahu. Dapat diketahui sebagian besar responden mengetahui mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Sedangkan sebagian responden dengan kategori tidak tahu maupun sangat tidak tahu mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dikarenakan kurangnya responden mengikuti perkembangan yang terjadi di daerahnya.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat di dalam mengikuti perkembangan yang terjadi disekitarnya menyebabkan masyarakat kurang memiliki pengetahuan mengenai perkembangan daerahnya sendiri. Hal tersebut nantinya akan merugikan masyarakat itu sendiri karena masyarakat tidak mengetahui potensi dari daerahnya sendiri yang dapat dikembangkan di dalam mensejahterakan kehidupan mereka.

b. Dilihat dari komponen Afektif

Pada komponen ini akan diketahui bagaimana perasaan responden mengenai lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung, maksud atau tujuan dari kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung, manfaat dari adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung.

1. Perasaan Masyarakat Terhadap Lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Selanjutnya setelah diketahui pengetahuan responden mengenai lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, alasan, maksud atau tujuan, manfaat, serta dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, maka sikap responden selanjutnya akan dilihat dari perasaan responden mengenai kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung yang dapat diketahui dari tabel di bawah ini :

Tabel 14 Distribusi jawaban perasaan masyarakat terhadap lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	5	12	12
	Setuju	4	38	38
	Cukup Setuju	3	13	13
	Tidak Setuju	2	24	24
	Sangat Tidak Setuju	1	13	13
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 12 responden (12%) menyatakan sangat setuju, 38 responden (38%) menyatakan setuju, 13 responden (13%) menyatakan cukup setuju, 24 responden (24%) menyatakan tidak setuju, 13 responden (13%) menyatakan sangat tidak setuju mengenai lokasi pembangunan Kota Baru Lampung.

Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai perasaan masyarakat terhadap lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Responden yang menjawab sangat setuju maupun setuju mengenai lokasi pembangunan Kota Baru Lampung berpendapat bahwa dengan lokasi tersebut tidak menggunakan tanah warga setempat. Sedangkan masyarakat yang menjawab cukup setuju, tidak setuju maupun yang menjawab sangat tidak setuju disebabkan karena mereka merasa kecewa kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang awalnya menetapkan lokasi pembangunan Kota Baru Lampung di Kecamatan Natar, serta masyarakat khawatir akan dampak yang terjadi dari adanya

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, yang menggunakan lahan perkebunan PTPN VII Unit Usaha Kedaton yang nantinya dapat menyebabkan bencana alam dikemudian hari.

2. Perasaan Masyarakat Terhadap Alasan Pemerintah Provinsi Lampung Mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Untuk melihat perasaan masyarakat mengenai alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Distribusi jawaban perasaan masyarakat terhadap alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
2	Sangat Setuju	5	4	4
	Setuju	4	53	53
	Cukup Setuju	3	16	16
	Tidak Setuju	2	22	22
	Sangat Tidak Setuju	1	5	5
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat diketahui jawaban responden mengenai perasaan responden terhadap alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yakni untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Kota Bandar Lampung saat ini. Sebanyak 4 responden (4%) menjawab sangat setuju, 53 responden (53%) menjawab setuju, 16 responden (16%) menjawab cukup setuju, 22 responden

(22%) menjawab tidak setuju, dan sisanya sebanyak 5 responden (5%) menjawab sangat tidak setuju.

Mayoritas jawaban responden menyatakan setuju terhadap alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung karena alasan tersebut dinilai positif oleh responden. Sedangkan responden yang menjawab cukup setuju, tidak setuju, maupun sangat tidak setuju berpendapat bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung bukan merupakan solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Kota Bandar Lampung karena hanya akan memindahkan persoalan yang di Kota Bandar Lampung ke Kota Baru Lampung.

3. Perasaan Masyarakat Terhadap Maksud Atau Tujuan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Setelah diketahui pengetahuan responden mengenai maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung pada komponen kognitif, maka selanjutnya sikap politik akan diukur dari komponen afektif yakni bagaimana perasaan masyarakat mengenai maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Perasaan masyarakat mengenai maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 16. Distribusi jawaban perasaan masyarakat terhadap maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
3	Sangat Setuju	5	9	9
	Setuju	4	62	62
	Cukup Setuju	3	15	15
	Tidak Setuju	2	13	13
	Sangat Tidak Setuju	1	1	1
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Tabel 16 di atas menunjukkan perasaan masyarakat mengenai maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Diketahui sebanyak 9 responden (9%) menjawab sangat setuju, 62 responden (62%) menjawab setuju, 15 responden (15%) menjawab cukup setuju, 13 responden (13%) menjawab tidak setuju, dan sisanya sebanyak 1 responden (1%) menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan tanggapan responden di atas, mayoritas responden menyatakan setuju mengenai maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung karena mereka berpendapat bahwa maksud atau tujuan dari adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung untuk mengembangkan daerah sekitar Kota Bandar Lampung sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat setempat. Sedangkan masyarakat yang menjawab cukup setuju, tidak setuju maupun sangat tidak setuju terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru

Lampung karena Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung hanya akan mengalihkan pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung ke Kota Baru Lampung yang akan menambah permasalahan baru.

4. Perasaan Masyarakat Terhadap Manfaat Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Pada aspek kognitif sebelumnya telah diketahui bahwa pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung berpengetahuan baik, maka selanjutnya sikap politik dilihat dari aspek afektif yakni bagaimana perasaan masyarakat mengenai manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Untuk melihat perasaan masyarakat mengenai manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Distribusi jawaban perasaan masyarakat terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
4	Sangat Setuju	5	10	10
	Setuju	4	56	56
	Cukup Setuju	3	8	8
	Tidak Setuju	2	26	26
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Tabel 17 di atas menunjukkan jawaban responden terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Dapat diketahui sebanyak 10 responden (10%) menjawab sangat setuju, 56 responden (56%) menjawab setuju, 8 responden (8%) menjawab cukup setuju, 26 responden (26%) menjawab tidak setuju mengenai manfaat pembangunan Kota Baru Lampung.

Responden yang menyatakan sangat setuju maupun setuju dengan manfaat dari adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yakni Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat baik segi ekonomi, pembangunan maupun sosial politik sebagai masyarakat perkotaan. Sedangkan responden yang menjawab cukup setuju, tidak setuju, maupun sangat tidak setuju disebabkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung tidak sepenuhnya bermanfaat, karena responden khawatir mengenai dampak negatif dari adanya kebijakan tersebut seperti kerusakan lingkungan dan sebagainya.

5. Perasaan Masyarakat Terhadap Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Pada aspek kognitif sebelumnya telah diketahui pengetahuan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Maka selanjutnya akan diukur melalui aspek afektif yakni perasaan masyarakat mengenai

dampak yang akan terjadi dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Untuk mengetahui perasaan masyarakat mengenai dampak yang akan terjadi dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18 Distribusi jawaban perasaan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
5	Sangat Setuju	5	6	6
	Setuju	4	38	38
	Cukup Setuju	3	13	13
	Tidak Setuju	2	23	23
	Sangat Tidak Setuju	1	20	20
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Tabel 18 di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai dampak yang akan terjadi dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Terlihat bahwa tanggapan responden terbagi menjadi dua kelompok yakni sebanyak sebanyak 6 responden (6%) menjawab sangat setuju, 38 responden (38%) menjawab setuju, 13 responden (13%) menjawab cukup setuju, 23 responden (23%) menjawab tidak setuju, dan sisanya sebanyak 20 responden (20%) menjawab sangat tidak setuju.

Responden yang menjawab sangat setuju maupun setuju dikarenakan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung akan lebih berdampak positif yakni dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat menjadikan daerahnya

semakin berkembang atau dapat memajukan daerahnya baik dari segi ekonomi, pembangunan, maupun sosial politik. Sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat setempat. Sedangkan responden yang menjawab cukup setuju, tidak setuju maupun sangat tidak setuju dikarenakan mereka beranggapan selain berdampak positif, Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung juga akan berdampak negatif yakni nantinya akan menimbulkan persoalan kepadatan pendudukan baru di Kota Baru Lampung akibat beralihnya penduduk Kota Bandar Lampung ke Kota Baru Lampung.

Selanjutnya untuk mengetahui aspek afektif responden secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 19. Rekapitulasi Komponen-Komponen Sikap dari Aspek Afektif

No	Pernyataan	SS	%	S	%	CS	%	TS	%	STS	%	Σ
1.	Perasaan Masyarakat Mengenai Lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung	12	12	38	38	13	13	24	24	13	13	100
2.	Perasaan Masyarakat Mengenai Alasan Pemerintah Provinsi	4	4	53	53	16	16	22	22	5	5	100

	Lampung Mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.											
3.	Perasaan Masyarakat Mengenai Maksud atau Tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	9	9	62	62	15	15	13	13	1	1	100
4.	Perasaan Masyarakat Mengenai Manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	10	10	56	56	8	8	26	26	0	0	100
5.	Perasaan Masyarakat Mengenai Dampak Yang Ditimbulkkan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	6	6	38	38	13	13	23	23	20	20	100
Total		41		247		65		108		39		500

Data Diolah Dari Hasil Penelitian, 2010

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

CS : Cukup Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Untuk mengetahui persentase komponen-komponen sikap responden dari aspek afektif digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

F: Frekuensi pada klasifikasi kategori yang bersangkutan

N: Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Berdasarkan tabel 19 di atas diperoleh persentase sebagai berikut :

$$\text{Sangat Setuju (SS)} = \frac{41}{500} \times 100\% = 8,2\%$$

$$\text{Setuju (S)} = \frac{247}{500} \times 100\% = 49,4\%$$

$$\text{Cukup Setuju (CS)} = \frac{65}{500} \times 100\% = 13\%$$

$$\text{Tidak Setuju (TS)} = \frac{108}{500} \times 100\% = 21,7\%$$

$$\text{Sangat Tidak Setuju (STS)} = \frac{39}{500} \times 100\% = 7,9\%$$

Berdasarkan perhitungan persentase di atas dapat diketahui sebanyak 8,2% responden menjawab sangat setuju, 49,4% responden menjawab setuju, 13% responden menjawab cukup setuju, 21,7% responden menjawab tidak setuju, dan sisanya sebanyak 7,9 menjawab sangat tidak setuju mengenai lokasi, alasan,

maksud atau tujuan, manfaat, serta dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Responden yang menyatakan sangat setuju, setuju maupun cukup setuju dikarenakan mereka menilai positif adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yang dapat membawa perubahan lebih baik bagi kehidupan masyarakat setempat. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju disebabkan oleh kekecewaan mereka terhadap lokasi awal dari pembangunan Kota Baru Lampung yang sebelumnya berada di Kecamatan Natar dan dipindahkan ke Kecamatan Jati Agung.

Selanjutnya untuk menganalisis komponen afektif responden digunakan rumus interval sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Intervensi nilai skor

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori jawaban

Nilai tertinggi (NT) dan nilai terendah (NR) dapat diketahui melalui tabel Rekapitulasi Komponen-Komponen Sikap Responden Berdasarkan Skor Jawaban (terlampir). Diketahui NT = 25 dan NR

= 8 dan kategori jawaban (K) ditentukan sebanyak 5. Sehingga nilai interval masing-masing kelas dapat diketahui :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{25 - 8}{5} = 3,4 \text{ dibulatkan menjadi } 3, \text{ maka dengan demikian dapat}$$

ditentukan :

Sangat Setuju ≥ 20

Setuju = 17-19

Cukup Setuju = 14-16

Tidak Setuju = 11-13

Sangat Tidak Setuju = 8-10

Tabel 20. Kategori Komponen Sikap dari Aspek Afektif

No.	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	29	29,00
2.	Setuju	23	23,00
3.	Cukup Setuju	21	21,00
4.	Tidak Setuju	18	18,00
5.	Sangat Tidak Setuju	9	9,00
Total		100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Tabel 20 di atas menunjukkan kategori perasaan responden menjadi lima kategori yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kategori sangat setuju maupun setuju yakni responden memiliki perasaan positif atau setuju mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung karena mereka

menganggap bahwa kebijakan tersebut dapat memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung, kategori cukup setuju yakni responden memiliki perasaan biasa saja mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, sedangkan kategori tidak setuju maupun sangat tidak setuju yakni responden berpendapat bahwa kebijakan tersebut hanya akan menambah persoalan baru bagi daerah mereka.

c. Dilihat dari komponen Evaluatif

Pada komponen ini sikap politik seseorang ditentukan oleh evaluasi moral yang telah dimiliki seseorang. Dalam hal ini norma-norma yang di anut akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap kehadiran sistem politik, norma-norma yang dimiliki masyarakat. Sehingga dalam komponen ini responden dapat memberikan penilaiannya terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

1. Penilaian Masyarakat Terhadap Lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Sebelumnya telah diketahui bagaimana pengetahuan dan perasaan responden terhadap lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, maka selanjutnya akan diukur dari penilaian masyarakat terhadap lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap

lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 21. Distribusi jawaban penilaian masyarakat terhadap lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	20	20
	Baik	4	39	39
	Cukup Baik	3	8	8
	Tidak Baik	2	25	5
	Sangat Tidak Baik	1	8	8
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 21 di atas dapat diketahui sebanyak 20 responden (20%) menyatakan sangat baik, 39 responden (39%) menyatakan baik, 8 responden (8%) menyatakan cukup baik, 25 responden (25%) menyatakan tidak baik, 8 responden (8%) menyatakan sangat tidak baik mengenai lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Responden yang menyatakan sangat baik maupun baik menilai bahwa lokasi Pembangunan Kota Baru Lampung tidak menggunakan tanah warga setempat tetapi menggunakan lahan perkebunan PTPN VII Unit Usaha Kedaton sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dengan hal tersebut. Sedangkan masyarakat yang menyatakan cukup baik, tidak baik, ataupun sangat tidak baik dikarenakan ada sebagian masyarakat yang bekerja sebagai buruh PTPN yang nantinya akan kehilangan mata

pencahariannya, serta mereka menilai akan dampak yang akan terjadi jika lahan perkebunan PTPN VII Unit Usaha dijadikan sebuah kota maka pada akhirnya akan menimbulkan bencana alam karena lahan perkebunan yang semula merupakan daerah resapan air berubah fungsi menjadi sebuah kota yang erat kaitannya dengan pembangunan.

2. Penilaian Masyarakat Terhadap Alasan Pemerintah Provinsi Lampung Mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yakni Pemerintah Provinsi Lampung menilai Kota Bandar Lampung saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan kota yang cukup serius yang harus segera diatasi, yakni pesatnya pertumbuhan penduduk, kemacetan lalu lintas dan daya tampung lahan yang terbatas sangat mempengaruhi kualitas lingkungan terutama di perkotaan maka selanjutnya akan diukur dari penilaian masyarakat mengenai alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 22. Distribusi jawaban penilaian masyarakat terhadap alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
2	Sangat Baik	5	15	15
	Baik	4	32	32
	Cukup Baik	3	21	21
	Tidak Baik	2	22	22
	Sangat Tidak Baik	1	10	10
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Tabel 22 di atas menunjukkan penilaian responden terhadap alasan alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Dapat diketahui sebanyak 15 responden (15%) menyatakan sangat baik, 32 responden (32%) menyatakan baik, 21 responden (21%) menyatakan cukup baik, 22 responden (22%) menyatakan tidak baik, 10 responden (10%) menyatakan sangat tidak baik terhadap alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Responden yang menyatakan sangat setuju ataupun setuju menilai tepat alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung untuk mengatasi masalah kependudukan di Kota Bandar Lampung. Sedangkan responden yang menyatakan cukup setuju, tidak setuju maupun sangat tidak setuju mengenai alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru

Lampung dikarenakan Kota Baru Lampung nantinya juga akan mengalami persoalan yang sama seperti Kota Bandar Lampung sehingga Pemerintah Provinsi Lampung harus mencari jalan lain untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Bandar Lampung.

3. Penilaian Masyarakat Terhadap Maksud Atau Tujuan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Setelah diketahui pengetahuan maupun perasaan masyarakat terhadap maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung maka selanjutnya akan diukur dari penilaian masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 23. Distribusi jawaban penilaian masyarakat terhadap maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
3	Sangat Baik	5	12	12
	Baik	4	41	41
	Cukup Baik	3	16	6
	Tidak Baik	2	19	19
	Sangat Tidak Baik	1	12	12
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 23 di atas dapat diketahui penilaian masyarakat mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Sebanyak 12 responden (12%) menyatakan sangat baik, 41 responden (41%) menyatakan baik, 16 responden (16%)

menyatakan cukup baik, 19 responden (19%) menyatakan tidak baik, 12 responden (12%) menyatakan sangat tidak baik terhadap maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Responden yang menyatakan sangat baik maupun baik menilai positif terhadap maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yakni untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di Kota Bandar Lampung, kesenjangan kota dengan daerah sekitarnya, serta membantu mengembangkan daerah pinggiran kota. Sedangkan masyarakat yang menyatakan cukup baik, tidak baik, ataupun sangat tidak baik berpendapat bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki maksud atau tujuan tertentu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan untuk Pembangunan Kota Baru Lampung yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Penilaian Masyarakat Terhadap Manfaat Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Manfaat dari kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung secara umum yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran kota dibidang ekonomi, pembangunan, maupun sosial politik. Penilaian masyarakat terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 24. Distribusi jawaban penilaian masyarakat terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
4	Sangat Baik	5	7	7
	Baik	4	27	27
	Cukup Baik	3	23	23
	Tidak Baik	2	35	35
	Sangat Tidak Baik	1	8	8
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 24 di atas diketahui penilaian responden terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, yakni sebanyak 7 responden (7%) menjawab sangat baik, 27 responden (27%) menjawab baik, 23 responden (23%) menjawab cukup baik, 35 responden (35%) menjawab tidak baik, dan sisanya sebanyak 8 responden (8%) menjawab sangat tidak baik.

Penilaian responden terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung terbagi dalam dua kelompok. Responden yang menjawab sangat baik maupun baik menilai bahwa dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat memperbaiki peekonomian daerah serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sedangkan responden yang menjawab cukup baik, tidak baik, maupun sangat tidak baik disebabkan dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung hanya akan menambah beban bagi daerahnya

yang disebabkan oleh beralihnya penduduk Kota Bandar Lampung ke kawasan Kota Baru Lampung.

5. Penilaian Masyarakat Terhadap Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung tentunya diharapkan berdampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan Kota Baru Lampung. Prediksi masyarakat terhadap kondisi daerah setelah dikeluarkannya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 25. Distribusi jawaban penilaian masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
5	Sangat Baik	5	7	7
	Baik	4	33	33
	Cukup Baik	3	21	21
	Tidak Baik	2	33	33
	Sangat Tidak Baik	1	6	6
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel 25 di atas, diketahui penilaian responden terhadap kondisi daerah setelah dikeluarkannya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yaitu sebanyak 7 responden (7%) menjawab sangat baik, 33 responden (33%) menjawab baik, 21 responden (21%) menjawab cukup baik, 33 responden (33%) menjawab tidak baik, dan sisanya sebanyak 6 responden (6%) menjawab sangat tidak baik.

Responden yang menyatakan sangat baik maupun baik karena mereka menilai dengan dikeluarkannya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung maka akan membawa harapan yang baik bagi daerahnya sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar kawasan Kota Baru Lampung. Sedangkan responden yang menjawab cukup baik, tidak baik, maupun sangat baik dikarenakan mereka menilai bahwa selain dampak positif dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung juga akan membawa dampak negatif yakni berubahnya alih fungsi perkebunan yang merupakan daerah resapan air menjadi pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung.

Selanjutnya untuk mengetahui aspek evaluatif responden secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 26. Rekapitulasi Komponen-Komponen Sikap dari Aspek Evaluatif

No	Pernyataan	SB	%	B	%	CB	%	TB	%	STB	%	Σ
1.	Penilaian Masyarakat Mengenai Lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung	20	20	39	39	8	8	25	25	8	8	100
2.	Penilaian Masyarakat Mengenai Alasan Pemerintah Provinsi	15	15	32	32	21	21	22	22	10	10	100

	Lampung Mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.											
3.	Penilaian Masyarakat Mengenai Maksud atau Tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	12	12	41	41	16	16	19	19	12	12	100
4.	Penilaian Masyarakat Mengenai Manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	7	7	27	27	23	23	35	35	8	8	100
5.	Penilaian Masyarakat Mengenai Dampak Yang Ditimbulkkan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	7	7	33	33	21	21	33	33	6	5	100
Total		61		172		89		134		44		500

Sumber : Data Diolah Dari Hasil Penelitian, 2010

Keterangan :

SB : Sangat Baik

TB : Tidak Baik

B : Baik

STB : Sangat Tidak Baik

CB : Cukup Baik

Untuk mengetahui persentase komponen-komponen sikap responden dari aspek evaluatif digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

F: Frekuensi pada klasifikasi kategori yang bersangkutan

N: Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Berdasarkan tabel 26 di atas diperoleh persentase sebagai berikut :

$$\text{Sangat Baik (SB)} = \frac{61}{500} \times 100\% = 12,2\%$$

$$\text{Baik (B)} = \frac{172}{500} \times 100\% = 34,4\%$$

$$\text{Cukup Baik (CB)} = \frac{89}{500} \times 100\% = 17,9\%$$

$$\text{Tidak Baik (TB)} = \frac{134}{500} \times 100\% = 26,9\%$$

$$\text{Sangat Tidak Baik (STB)} = \frac{44}{500} \times 100\% = 8,9\%$$

Berdasarkan perhitungan persentase di atas dapat diketahui sebanyak 12,2% responden menjawab sangat baik, 34,4% responden menjawab baik, 17,9% responden menjawab cukup baik, 26,9% responden menjawab tidak baik, dan sisanya sebanyak 8,9% menjawab sangat tidak baik mengenai lokasi, alasan, maksud atau

tujuan, manfaat, serta dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Responden yang menilai sangat baik, baik maupun cukup baik mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung disebabkan oleh kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung. Sedangkan responden yang menilai tidak baik maupun sangat tidak baik dikarenakan kebijakan tersebut selain membawa dampak positif juga akan membawa dampak negatif bagi daerahnya.

Selanjutnya untuk menganalisis komponen evaluatif responden digunakan rumus interval sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Intervensi nilai skor

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori jawaban

Nilai tertinggi (NT) dan nilai terendah (NR) dapat diketahui melalui tabel Rekapitulasi Komponen-Komponen Sikap Responden Berdasarkan Skor Jawaban (terlampir). Diketahui NT = 24 dan NR

= 7 dan kategori jawaban (K) ditentukan sebanyak 5. Sehingga nilai interval masing-masing kelas dapat diketahui :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{24 - 7}{5} = 3,4, \text{ dibulatkan menjadi } 4 \text{ maka dengan demikian dapat}$$

ditentukan :

Sangat Baik	≥ 19
Baik	= 16-18
Cukup Baik	= 13-15
Tidak Baik	= 10-12
Sangat Tidak Baik	= 7-9

Tabel 27. Kategori Komponen Sikap dari Aspek Evaluatif

No.	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	36	36,00
2.	Baik	19	19,00
3.	Cukup Baik	19	19,00
4.	Tidak Baik	15	15,00
5.	Sangat Tidak Baik	11	11,00
Total		100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Tabel 27 di atas menunjukkan kategori pengetahuan responden menjadi lima kategori yaitu sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, sangat tidak baik. Kategori sangat baik maupun baik yakni responden menilai baik atau positif mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung karena dengan adanya kebijakan

tersebut dapat memajukan daerah mereka, serta mereka menilai kebijakan tersebut merupakan pilihan yang tepat di dalam mengatasi persoalan Kota Bandar Lampung saat ini. Sedangkan kategori cukup baik yakni responden menilai cukup baik atau biasa saja mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dan kategori tidak baik maupun sangat tidak baik yakni responden menilai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung bukan merupakan pilihan yang tepat di dalam mengatasi kepadatan penduduk maupun kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung, serta kebijakan tersebut hanya akan memindahkan persoalan Kota Bandar Lampung ke kawasan Kota Baru Lampung.

C. Sikap Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Pada bagian ini kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden dimasukkan dalam tabel tunggal yang kemudian dipersentasekan dan diinterpretasikan. Dari proses tersebut maka diketahui Sikap Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yaitu :

a. Sikap Mendukung

Pada komponen ini diketahui sebab-sebab mengapa masyarakat perlu mengetahui dan melaksanakan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

1. Respek Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dilakukan untuk mengatasi persoalan kepadatan penduduk di Kota Bandar Lampung dan membantu mensejahterakan masyarakat pinggiran Kota Bandar Lampung. Sikap masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 28. Distribusi jawaban respek masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	5	48	48
	Setuju	4	39	39
	Cukup Setuju	3	13	13
	Tidak Setuju	2	0	0
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 28 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 48 responden (48%) menyatakan sangat setuju, 39 responden (39%) menyatakan setuju, dan 13 responden (13%) responden cukup setuju terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Sebagian besar responden sangat mendukung Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, jika kebijakan tersebut dilakukan untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi Kota Bandar Lampung saat ini yakni kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas serta untuk membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat

pinggiran kota agar terjadi penyamarataan antara Kota Bandar Lampung dengan daerah sekitarnya.

2. Keyakinan Masyarakat Bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Dibuat Secara Sah Oleh Pemerintah Yang Berwenang, Serta Dibuat Melalui Prosedur Yang Benar.

Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 Kegiatan pemerintahan Provinsi Lampung terletak di Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya akan di pindahkan ke Tanjung Bintang dan sekarang menjadi Kecamatan Jati Agung dalam kawasan Kota Baru Lampung.

Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pembangunan kotabaru yang dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam kesatuan ruang wilayah provinsi. Pembangunan kota baru dimaksudkan untuk melayani kegiatan pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, serta kegiatan berbagai usaha ekonomi, pariwisata dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya.

Tabel 29. Distribusi jawaban keyakinan masyarakat bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dibuat secara sah oleh pemerintah yang berwenang, serta dibuat melalui prosedur yang benar.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
2	Sangat Yakin	5	0	0
	Yakin	4	51	51
	Cukup Yakin	3	16	16
	Tidak Yakin	2	33	33
	Sangat Tidak Yakin	1	0	0
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 29 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 51 responden (51%) menyatakan yakin, 16 responden (16%) menyatakan cukup yakin, dan 33 responden (33%) responden tidak yakin bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dibuat secara sah oleh pemerintah yang berwenang, serta dibuat melalui prosedur yang benar.

Responden yang menilai cukup yakin bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dibuat secara sah oleh pemerintah yang berwenang, serta dibuat melalui prosedur yang benar dikarenakan Pemerintah Provinsi Lampung sejauh ini tidak konsisten terhadap lokasi awal dari Pembangunan Kota Baru Lampung yakni di Kecamatan Natar dan sekarang dipindahkan ke Kecamatan Jati Agung. Sebelum mengambil kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung harusnya lebih mempertimbangkan apa yang akan dilakukan sehingga

tidak ada keraguan di masyarakat mengenai kebijakan yang di ambil oleh pemerintah.

3. Adanya Kepentingan Pribadi Yang Diperoleh Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung berdampak bagi masyarakat setempat, masyarakat nantinya dapat merasakan langsung manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan dari adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, seperti para pemilik tanah yang menjual tanahnya dengan harga yang cukup tinggi.

Tabel 30. Distribusi jawaban adanya kepentingan pribadi yang diperoleh dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
3.	Sangat Setuju	5	26	26
	Setuju	4	64	64
	Cukup Setuju	3	6	6
	Tidak Setuju	2	4	4
	Sangat Tidak Setuju	1	0	0
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 30 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 26 responden (26%) menyatakan sangat setuju, 64 responden (64%) menyatakan setuju, 6 responden (6%) menyatakan cukup setuju, serta 4 responden (4%) menyatakan tidak setuju mengenai dampak positif

yang akan di dapat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Sebagian besar responden menyatakan setuju mengenai dampak positif yang akan diperoleh dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung membuat para pemilik tanah rela pindah kepedalaman desa karena tergiur harga tanah yang cukup mahal, selain itu dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung maka akan memperbaiki infrastruktur seperti jalan yang rusak dan membantu mengembangkan daerah kawasan pengembangan Kota Baru Lampung.

Selanjutnya untuk mengetahui sikap mendukung responden secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 31. Rekapitulasi Sikap Mendukung Responden

No	Pernyataan	SS	%	S	%	CS	%	TS	%	STS	%	Σ
1.	Respek Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung	48	48	39	39	13	13	0	0	0	0	100
		SY	%	Y	%	CY	%	TY	%	STY	%	Σ
2.	Keyakinan Masyarakat Bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru	0	0	51	51	16	16	33	33	0	0	100

	Lampung Dibuat Secara Sah Oleh Pemerintah Yang Berwenang, Serta Dibuat Melalui Prosedur Yang Benar.											
		SS	%	S	%	CS	%	TS	%	STS	%	Σ
3.	Adanya Kepentingan Pribadi Yang Diperoleh Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	26	26	64	64	6	6	4	4	0	0	100
Total		74		154		35		37		0		300

Sumber : Data Diolah Dari Hasil Penelitian, 2010

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

CS : Cukup Setuju

SY : Sangat Yakin

TY : Tidak Yakin

Y : Yakin

STY : Sangat Tidak Yakin

CY : Cukup Yakin

Untuk mengetahui persentase sikap mendukung responden digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

F: Frekuensi pada klasifikasi kategori yang bersangkutan

N: Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Berdasarkan tabel 26 di atas diperoleh persentase sebagai berikut :

$$\text{Sangat Setuju/ Sangat Yakin (SS/SY)} = \frac{74}{300} \times 100\% = 24,7\%$$

$$\text{Setuju/Yakin (S/Y)} = \frac{154}{300} \times 100\% = 51,3\%$$

$$\text{Cukup Setuju/Cukup Yakin (CS/CY)} = \frac{35}{300} \times 100\% = 11,7\%$$

$$\text{Tidak Setuju/Tidak Yakin (TS/TY)} = \frac{37}{300} \times 100\% = 12,3\%$$

Berdasarkan perhitungan persentase di atas dapat diketahui bahwa sikap mendukung responden sebanyak 24,7% responden menjawab sangat setuju/sangat yakin, 51,3% responden menjawab setuju/yakin, 11% responden menjawab cukup setuju/cukup yakin, dan sisanya 12,3% responden menjawab tidak setuju/tidak yakin.

Sebagian responden sangat setuju/sangat yakin, setuju/yakin dan cukup setuju/cukup yakin mengenai adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung karena nantinya mereka sendiri yang akan merasakan langsung manfaat dari adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju/tidak yakin maupun sangat tidak

setuju/sangat tidak yakin dikarenakan keraguan mereka akan realisasi dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Selanjutnya untuk menganalisis aspek mendukung responden digunakan rumus interval sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Intervensi nilai skor

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori jawaban

Nilai tertinggi (NT) dan nilai terendah (NR) dapat diketahui melalui tabel Rekapitulasi Jawaban Responden Dari Aspek Mendukung Berdasarkan Skor Jawaban (terlampir). Diketahui NT = 14 dan NR = 8 dan kategori jawaban (K) ditentukan sebanyak 5. Sehingga nilai interval masing-masing kelas dapat diketahui :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{14 - 8}{5} = 1,2, \text{ dibulatkan menjadi } 1 \text{ maka dengan demikian dapat}$$

ditentukan :

Sangat Setuju/Sangat Yakin	≥ 12
Setuju/Yakin	= 11
Cukup Setuju/Cukup Yakin	= 10
Tidak Setuju/Tidak Yakin	= 9
Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Yakin	= 8

Tabel 32. Kategori Sikap Mendukung

No.	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju/Sangat Yakin	61	61,00
2.	Setuju/Yakin	23	23,00
3.	Cukup Setuju/Cukup Yakin	11	11,00
4.	Tidak Setuju/Tidak Yakin	4	4,00
5.	Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Yakin	1	1,00
Total		100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Tabel 32 di atas menunjukkan sikap mendukung responden menjadi lima kategori yaitu sangat setuju/sangat yakin, setuju/yakin, cukup setuju/cukup yakin, tidak setuju/tidak yakin, dan sangat tidak setuju/sangat tidak yakin. Kategori sangat setuju/ sangat yakin ataupun setuju/yakin yakni responden mendukung adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung karena kebijakan tersebut berdampak positif bagi mereka, kategori cukup setuju/cukup yakin yakni responden cukup mendukung adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dan kategori tidak setuju/tidak yakin maupun sangat tidak setuju/sangat tidak yakin yakni responden berpendapat bahwa kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan golongan tertentu saja.

b. Sikap Menolak

Pada komponen ini akan diketahui faktor-faktor yang menyebabkan mengapa orang tidak mematuhi dan melaksanakan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

1. Dilihat Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Bertentangan Dengan Sistem Nilai Yang Ada Di Dalam Masyarakat Kawasan Pengembangan Kota Baru Lampung.

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung selain membawa dampak positif tetapi juga negatif yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada di dalam masyarakat. Sikap masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 33. Distribusi jawaban Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung bertentangan dengan sistem nilai yang ada di dalam masyarakat kawasan pengembangan Kota Baru Lampung.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	1	0	0
	Setuju	2	24	24
	Cukup Setuju	3	31	31
	Tidak Setuju	4	44	44
	Sangat Tidak Setuju	5	1	1
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 33 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 24 responden (24%) menyatakan setuju, 31 responden (31%) menyatakan cukup setuju, dan 44 responden (44%) menyatakan tidak setuju, dan sisanya 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju bahwa Kebijakan

Pembangunan Kota Baru Lampung bertentangan dengan sistem nilai yang ada di dalam masyarakat kawasan pengembangan Kota Baru Lampung.

Setiap daerah memiliki nilai-nilai dan budayanya sendiri. Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung menjadikan daerah yang tadinya desa menjadi sebuah kota. Daerah yang tadinya merupakan sebuah desa yang tentram dengan keramahan masyarakat desa menjadi daerah pusat segala aktifitas yang syarat dengan keramaian dan sikap individualis masyarakat kota pada umumnya. Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan tidak membawa perubahan pada sikap masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan persaudaraan.

2. Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Bertentangan Dengan Ide Atau Gagasan Suatu Kelompok Dalam Masyarakat Kawasan Pengembangan Kota Baru Lampung.

Setiap daerah memiliki suatu perkumpulan atau kelompok yang di dalamnya memiliki ide atau gagasan bagi kemajuan daerahnya. Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung menimbulkan suatu bentuk sikap dikalangan masyarakat buruh PTPN yang menolak Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Sikap masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 34. Distribusi jawaban Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung bertentangan dengan ide atau gagasan suatu kelompok dalam masyarakat kawasan pengembangan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
2.	Sangat Setuju	1	0	0
	Setuju	2	35	35
	Cukup Setuju	3	28	28
	Tidak Setuju	4	37	37
	Sangat Tidak Setuju	5	0	0
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 34 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 35 responden (35%) menyatakan setuju, 28 responden (28%) menyatakan cukup setuju, dan 37 responden (37%) menyatakan tidak setuju bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung bertentangan dengan ide atau gagasan suatu kelompok dalam masyarakat kawasan pengembangan Kota Baru Lampung.

Sebagian responden menyatakan bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung bertentangan dengan ide atau gagasan suatu kelompok dalam masyarakat kawasan pengembangan Kota Baru Lampung dan sebagian lagi tidak setuju bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung bertentangan dengan ide atau gagasan suatu kelompok dalam masyarakat kawasan pengembangan Kota Baru Lampung. Hal ini dikarenakan penduduk yang bekerja sebagai buruh PTPN VII menolak adanya Pembangunan Kota Baru Lampung yang memakai lahan PTPN VII tersebut, karena penduduk

yang bekerja sebagai buruh PTPN VII harus kehilangan mata pencahariannya dan mereka juga khawatir akan alih fungsi lahan PTPN VII yang tadinya sebagai daerah resapan air berubah menjadi sebuah kota yang syarat akan bangunan atau gedung-gedung tinggi yang nantinya akan menimbulkan bencana alam di wilayah mereka.

3. Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Tidak Jelas Dasar Hukumnya.

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang RTRW Provinsi Lampung dan Surat Izin Menteri Negara BUMN Nomor S-747/MBU/2009 Perihal Persetujuan Pemanfaatan Lahan PTPN VII Unit Usaha Kedaton yang direncanakan sebagai Kota Baru Lampung yang akan dibangun pada lahan PTPN VII Unit Usaha Kedaton yang berada di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan seluas 1.669 ha dari jumlah keseluruhan 3.252,90 ha.

Tabel 35. Distribusi jawaban Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung tidak jelas dasar hukumnya.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
3.	Sangat Setuju	1	4	4
	Setuju	2	21	21
	Cukup Setuju	3	5	5
	Tidak Setuju	4	50	50
	Sangat Tidak Setuju	5	20	20
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 35 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 4 responden (4%) menyatakan sangat setuju, 21 responden (21%) menyatakan setuju, 5 responden (5%) menyatakan cukup setuju, serta 50 responden (50%) menyatakan tidak setuju dan 20 responden (20%) menyatakan sangat tidak setuju bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung tidak jelas dasar hukumnya.

Responden yang setuju bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung tidak jelas dasar hukumnya dikarenakan kurangnya mereka memperoleh informasi mengenai Pembangunan Kota Baru Lampung dari berbagai media informasi seperti media massa, cetak maupun elektronik.

Selanjutnya untuk mengetahui sikap menolak masyarakat secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 36. Rekapitulasi Sikap Menolak Responden

No	Pernyataan	SS	%	S	%	CS	%	TS	%	STS	%	Σ
1.	Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Bertentangan Dengan Sistem Nilai Yang Ada Di Dalam Masyarakat Kawasan Pengembangan Kota Baru Lampung.	0	0	24	24	31	31	44	44	1	1	100

2.	Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Bertentangan Dengan Ide Atau Gagasan Dalam Masyarakat Kawasan Pengembangan Kota Baru Lampung.	0	0	35	35	28	28	37	37	0	0	100
3.	Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Tidak Jelas Dasar Hukumnya.	4	4	21	21	5	5	50	50	20	20	100
Total		4		80		64		131		21		300

Data Diolah Dari Hasil Penelitian, 2010

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

CS : Cukup Setuju

Untuk mengetahui persentase sikap menolak responden digunakan

rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

F: Frekuensi pada klasifikasi kategori yang bersangkutan

N: Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Berdasarkan tabel 36 di atas diperoleh persentase sebagai berikut :

Sangat Setuju (SS)	$= \frac{4}{300} \times 100\% = 1,3\%$
Setuju (S)	$= \frac{80}{300} \times 100\% = 26,7\%$
Cukup Setuju (CS)	$= \frac{64}{300} \times 100\% = 21,3\%$
Tidak Setuju (TS)	$= \frac{131}{300} \times 100\% = 43,7\%$
Sangat Tidak Setuju (STS)	$= \frac{21}{300} \times 100\% = 7\%$

Berdasarkan perhitungan persentase di atas dapat diketahui bahwa sikap menolak responden sebanyak 1,3% responden menjawab sangat setuju, 26,7% responden menjawab setuju, 21,3% responden menjawab cukup setuju, 43,7% responden menjawab tidak setuju, dan sisanya 7% responden menjawab sangat tidak setuju.

Responden yang menyatakan sangat setuju, setuju maupun cukup setuju berpendapat bahwa dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung akan menjadikan buruh PTPN VII kehilangan mata pencahariannya sehingga Pemerinath Provinsi Lampung juga harus memikirkan nasib mereka. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju, berpendapat bahwa dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, pembangunan maupun sosial, politik.

Selanjutnya untuk menganalisis aspek menolak responden digunakan rumus interval sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Intervensi nilai skor

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori jawaban

Nilai tertinggi (NT) dan nilai terendah (NR) dapat diketahui melalui tabel Rekapitulasi Jawaban Responden Dari Aspek Menolak Berdasarkan Skor Jawaban (terlampir). Diketahui NT = 12 dan NR = 6 dan kategori jawaban (K) ditentukan sebanyak 5. Sehingga nilai interval masing-masing kelas dapat diketahui :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{12 - 6}{5} = 1,2 \text{ dibulatkan menjadi } 1 \text{ maka dengan demikian dapat}$$

ditentukan :

Sangat Setuju = 6

Setuju = 7

Cukup Setuju = 8

Tidak Setuju = 9

Sangat Tidak Setuju \geq 10

Tabel 37. Kategori Sikap Menolak

No.	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	6	6,00
2.	Setuju	6	6,00
3.	Cukup Setuju	16	16,00
4.	Tidak Setuju	8	8,00
5.	Sangat Tidak Setuju	64	64,00
Total		100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Tabel 37 di atas menunjukkan sikap menolak responden menjadi lima kategori yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kategori sangat setuju maupun setuju yakni responden menolak adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, kategori cukup setuju yakni responden bersikap biasa saja artinya tidak menolak ataupun mendukung adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dan kategori tidak setuju maupun sangat tidak setuju yakni responden tidak menolak adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Responden yang menolak adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang bekerja sebagai buruh PTPN yang nantinya akan kehilangan mata pencahariannya, serta mereka juga takut akan dampak bencana alam yang dapat ditimbulkan dari alih fungsi perkebunan PTPN VII yang semula merupakan daerah resapan air. Sedangkan responden yang tidak menolak adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru

Lampung dikarenakan kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan mereka sendiri.

c. Sikap Tidak Peduli

Pada komponen ini akan diketahui beberapa alasan mengapa orang bersikap tidak peduli terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

1. Orang Merasa Tidak Melihat Adanya Perbedaan Yang Tegas Antara Keadaan Sebelumnya Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Dampak dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung nantinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung. Sikap masyarakat terhadap hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 38. Distribusi jawaban orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	9	9
	Setuju	2	15	15
	Cukup Setuju	3	0	0
	Tidak Setuju	4	2	2
	Sangat Tidak Setuju	5	74	74
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 38 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 9 responden (9%) menyatakan sangat setuju, 15 responden (15%)

menyatakan setuju, 2 responden (2%) menyatakan tidak setuju, dan sisanya 74 responden (74%) menyatakan sangat tidak setuju bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung tidak dapat memperbaiki kondisi ekonomi, pembangunan, sosial, politik masyarakat sekitar pengembangan Kota Baru Lampung.

Sebagian besar responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung tidak dapat membawa perubahan yang lebih baik dari sebelumnya bagi masyarakat kawasan pengembangan Kota Baru Lampung karena dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat memperbaiki kondisi ekonomi, pembangunan, sosial maupun politik masyarakat sekitar.

2. Seseorang Cenderung Kurang Peduli Terhadap Suatu Kebijakan Jika Merasa Bahwa Tidak Ada Masalah Terhadap Hal Yang Dilakukan, Karena Ia Tidak Dapat Mengubah Hasilnya Dengan Jelas.

Pembangunan Kota Baru Lampung sudah menjadi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak dapat merubahnya. Sikap masyarakat mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 39. Distribusi jawaban seseorang cenderung kurang peduli terhadap suatu kebijakan jika merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat mengubah hasilnya dengan jelas.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
2.	Sangat Setuju	1	10	10
	Setuju	2	45	45
	Cukup Setuju	3	18	18
	Tidak Setuju	4	27	27
	Sangat Tidak Setuju	5	0	0
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 39 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 10 responden (10%) menyatakan sangat setuju, 45 responden (45%) menyatakan setuju, 18 responden (18%) menyatakan cukup setuju, serta 27 responden (27%) menyatakan tidak setuju mengenai kecenderungan seseorang kurang peduli terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung jika merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat mengubah hasilnya dengan jelas.

Sebagian responden menyatakan setuju bahwa seseorang cenderung kurang peduli terhadap suatu kebijakan yang dalam hal ini adalah Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dikarenakan responden beranggapan bahwa biasanya aspirasi masyarakat menengah ke bawah tidak dapat tersalurkan dengan baik sehingga masyarakat kurang peduli terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah karena hanya akan sia-sia. Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju

dikarenakan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung merupakan pilihan yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

3. Jika Pengetahuan Seseorang Mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Terlalu Terbatas.

Pengetahuan seseorang tidak hanya di dapat dari bangku sekolah tetapi juga dari berbagai sarana informasi yang tersedia. Sikap masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 40. Distribusi jawaban jika pengetahuan seseorang mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung terlalu terbatas.

No	Klasifikasi Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase (%)
3.	Sangat Setuju	1	10	10
	Setuju	2	54	54
	Cukup Setuju	3	6	6
	Tidak Setuju	4	25	25
	Sangat Tidak Setuju	5	5	5
Jumlah			100	100

Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel 40 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 10 responden (10%) menyatakan sangat setuju, 54 responden (54%) menyatakan setuju, 6 responden (6%) menyatakan cukup setuju, serta 25 responden (25%) menyatakan tidak setuju, dan 5 responden (5%) menyatakan sangat tidak setuju mengenai jika pengetahuan seseorang terlalu terbatas maka cenderung kurang peduli terhadap suatu

kebijakan dalam hal ini Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Responden seharusnya dapat berperan aktif di dalam mengikuti perkembangan di daerahnya. Peranan media masa sangat diperlukan dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang terjadi di daerahnya.

Selanjutnya untuk mengetahui sikap tidak peduli responden secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 41. Rekapitulasi Sikap Tidak Peduli Responden

No	Pernyataan	SS	%	S	%	CS	%	TS	%	STS	%	Σ
1.	Orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.	9	9	15	15	0	0	2	2	74	74	100
2.	Seseorang Cenderung Kurang Peduli Terhadap Suatu Kebijakan Jika Merasa Bahwa Tidak Ada Masalah	10	10	45	45	18	18	27	27	0	0	100

	Terhadap Hal Yang Dilakukan, Karena Ia Tidak Dapat Mengubah Hasilnya Dengan Jelas.											
3.	Jika Pengetahuan Seseorang Mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung Terlalu Terbatas.	10	10	54	54	6	6	25	25	5	5	100
Total		29		114		24		54		79		300

Data Diolah Dari Hasil Penelitian, 2010

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

CS : Cukup Setuju

Untuk mengetahui persentase sikap tidak peduli responden digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

F: Frekuensi pada klasifikasi kategori yang bersangkutan

N: Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Berdasarkan tabel 41 di atas diperoleh persentase sebagai berikut :

Sangat Setuju (SS)	$= \frac{29}{300} \times 100\% = 9,7\%$
Setuju (S)	$= \frac{114}{300} \times 100\% = 38\%$
Cukup Setuju (CS)	$= \frac{24}{300} \times 100\% = 8\%$
Tidak Setuju (TS)	$= \frac{54}{300} \times 100\% = 18\%$
Sangat Tidak Setuju (STS)	$= \frac{79}{300} \times 100\% = 26,3\%$

Berdasarkan perhitungan persentase di atas dapat diketahui bahwa sikap tidak peduli responden sebanyak 9,7% responden menjawab sangat setuju, 38% responden menjawab setuju, 8% responden menjawab cukup setuju, 18% responden menjawab tidak setuju, dan sisanya 26,3% responden menjawab sangat tidak setuju.

Responden yang menyatakan sangat setuju, setuju maupun cukup setuju dikarenakan responden menilai bahwa Pembangunan Kota Baru Lampung tidak dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan mereka, serta pembangunan Kota Baru Lampung sudah menjadi suatu kebijakan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat harus mau menerima kebijakan tersebut. Responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju berpendapat bahwa sebagai masyarakat harus berperan aktif di dalam mengikuti perkembangan di daerahnya sehingga dapat memajukan potensi yang ada di daerahnya sendiri.

Selanjutnya untuk menganalisis aspek tidak peduli responden digunakan rumus interval sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Intervensi nilai skor

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori jawaban

Nilai tertinggi (NT) dan nilai terendah (NR) dapat diketahui melalui tabel Rekapitulasi Jawaban Responden Dari Aspek Tidak Peduli Berdasarkan Skor Jawaban (terlampir). Diketahui NT = 14 dan NR = 5 dan kategori jawaban (K) ditentukan sebanyak 5. Sehingga nilai interval masing-masing kelas dapat diketahui :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{14 - 5}{5} = 1,8, \text{ dibulatkan menjadi } 2 \text{ maka dengan demikian dapat}$$

ditentukan :

Sangat Setuju = 5-6

Setuju = 7-8

Cukup Setuju = 9-10

Tidak Setuju = 11-12

Sangat Tidak Setuju ≥ 13

Tabel 42. Kategori Sikap Tidak Peduli

No.	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	17	17,00
2.	Setuju	10	10,00
3.	Cukup Setuju	42	42,00
4.	Tidak Setuju	20	20,00
5.	Sangat Tidak Setuju	11	11,00
Total		100	100

Sumber : Data Diolah Dari Hasil Penelitian 2010

Tabel 42 di atas menunjukkan sikap tidak peduli responden menjadi lima kategori yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kategori sangat setuju ataupun setuju yakni responden bersikap tidak peduli dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, kategori cukup setuju yakni responden bersikap biasa saja dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dan kategori tidak setuju maupun sangat tidak setuju yakni responden bersikap peduli dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Responden yang bersikap tidak peduli dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dikarenakan kurangnya responden memperoleh informasi mengenai pembangunan Kota Baru Lampung, serta responden menilai bahwa kebijakan tersebut tidak dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung,

dikarenakan pembangunan Kota Baru Lampung hanya akan menguntungkan golongan tertentu saja.

Pemerintah Provinsi harusnya lebih pro aktif di dalam menyebarluaskan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung sehingga masyarakat nantinya bersikap peduli terhadap kebijakan tersebut.

D. Analisis Tabel Silang Berdasarkan Kategori Jawaban

Untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan komponen sikap dengan sikap politik masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, maka dibuat tabel silang antara variabel komponen sikap dengan sikap politik masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Adapun klasifikasinya adalah mendukung, menolak, tidak peduli yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 43. Kategori hubungan antara komponen sikap dengan sikap politik responden terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

No.	Komponen Sikap	Sikap Politik			Total (%)
		Mendukung F (%)	Menolak F (%)	Tidak Peduli F (%)	
1.	Kognitif	38 (67%) (54%)	6 (11%) (50%)	13 (23%) (76%)	57 (55%)
2.	Afektif	25 (89%) (35%)	2 (7%) (17%)	1 (4%) (6%)	28 (28%)
3.	Evaluatif	8 (53%) (11%)	4 (27%) (33%)	3 (20%) (18%)	15 (15%)
Total		71 (71%)	12 (12%)	17 (17%)	100 (100%)

Data Diperoleh Dari Hasil Penelitian, 2010

Berdasarkan tabel 43 di atas dapat diketahui dari 100 responden sebanyak 57 responden (57%) dengan komponen kognitif yakni responden memiliki pengetahuan mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Dan dari 62 responden tersebut terdapat 38 responden (67%) yang termasuk kategori mendukung yang terletak pada sikap politik masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Sebanyak 6 responden (11%) menolak adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dan sisanya sebanyak 13 responden (23%) bersikap tidak peduli terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Responden dengan kategori kognitif mayoritas berada pada sikap mendukung yang disebabkan oleh Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dilakukan untuk mengatasi persoalan yang ada di Kota Bandar Lampung yakni kepadatan penduduk serta

kemacetan lalu lintas. Sedangkan responden yang bersikap menolak maupun tidak peduli berpendapat bahwa kebijakan tersebut hanya akan memindahkan persoalan yang ada di Kota Bandar Lampung ke Kota Baru Lampung.

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas diketahui sebanyak 28 responden (28%) dengan komponen afektif yakni responden memiliki sikap atau perasaan terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Dari 28 responden tersebut diketahui sebanyak 25 responden (89%) mendukung adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Sebanyak 2 responden (7%) menolak adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Dan 1 responden (4%) bersikap tidak peduli terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Responden yang mendukung berpendapat bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar kawasan pembangunan Kota Baru Lampung, sedangkan responden yang menolak ataupun bersikap tidak peduli dikarenakan mereka merasa bahwa kebijakan tersebut tidak dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Sebanyak 15 responden (15%) dengan komponen evaluatif yakni responden memberikan penilaiannya terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Diketahui sebanyak 8 responden (53%) mendukung adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Sebanyak 4 responden (27%) menolak adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dan sisanya sebanyak 3 responden (20%) bersikap tidak peduli terhadap Kebijakan

Pembangunan Kota Baru Lampung. Responden dengan kategori mendukung berpendapat bahwa Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung merupakan pilihan yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghindari kesenjangan antara Kota Bandar Lampung dengan daerah sekitarnya.

Tabel di atas juga menunjukkan sebanyak 71 responden (71%) berada pada kategori sikap mendukung yang diperoleh dari komponen kognitif sebanyak 38 responden (54%), komponen afektif sebanyak 25 responden (35%), dan sisanya dari komponen evaluatif sebanyak 8 responden (11%). Selanjutnya juga diperoleh sebanyak 12 responden (12%) dengan kategori sikap menolak diantaranya sebanyak 6 responden (50%) berada pada komponen kognitif, 2 responden (17%) berada pada komponen afektif, dan sisanya sebanyak 4 responden (33%) berada pada komponen evaluatif. Sedangkan dilihat dari kategori sikap tidak peduli diketahui sebanyak 17 responden (17%) diantaranya sebanyak 13 responden (76%) berada pada komponen kognitif, 1 responden (6%) berada pada komponen afektif, dan sebanyak 3 responden (18%) berada pada komponen evaluatif.

Berdasarkan tabel silang di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden diketahui sebanyak 57 responden (57%) berada pada komponen kognitif, 28 responden (28%) berada pada komponen afektif, dan 15 responden (15%) berada pada komponen evaluatif. Sebagian besar responden berada pada komponen kognitif yakni responden yang memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan dengan responden yang memiliki

perasaan maupun penilaian terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dikarenakan responden hanya sebatas mengetahui kebijakan tersebut yang disebabkan oleh Pembangunan Kota Baru Lampung sudah menjadi suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sehingga masyarakat harus mau menerima kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut tidak dapat dirubah.

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas juga diketahui mayoritas responden bersikap mendukung, menolak, maupun tidak peduli berada pada kategori kognitif atau responden memiliki pengetahuan mengenai Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Menurut Irfan Islamy (2003:107-113) suatu kebijakan akan lebih efektif jika pemerintah dapat menyebarluaskan kebijakan-kebijakan yang baru kepada anggota masyarakat, tetapi proses komunikasi tersebut menjadi titik lemah di dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Selain itu kebijakan seringkali dinilai bersifat politis dan mempunyai kecenderungan-kecenderungan tertentu seperti kepentingan individu, ideologi, dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap mendukung, menolak, maupun tidak peduli dari responden mayoritas adalah berada pada kategori kognitif, dimana setiap individu memiliki persepsi sendiri di dalam menafsirkan atau memahami Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yang diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman yang diperoleh dari berbagai informasi yang ada. Serta adanya kepentingan pribadi dari adanya Kebijakan

Pembangunan Kota Baru Lampung yang dapat menyebabkan seseorang untuk bersikap mendukung, menolak ataupun tidak peduli terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dianalisis beberapa faktor yang menyebabkan sebagian responden berada pada komponen kognitif, yakni faktor sosial yang berupa tingkat pendidikan, dan faktor ekonomi yang berupa tingkat pendapatan.

a. Faktor sosial yang berupa tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap politik seseorang. Belum maksimalnya tingkat pendidikan responden, diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan komponen kognitif lebih besar daripada komponen afektif maupun evaluatif. Seperti terlihat pada identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan, masih ditemukannya responden yang hanya berpendidikan SD atau SLTP.

b. Faktor ekonomi berupa tingkat pendapatan

Kehidupan penduduk pedesaan umumnya akrab dengan sifat tradisional, karena sifat-sifat tersebut penduduk desa kurang memiliki kemampuan dalam tingkat pendapatan. Seperti yang telah diketahui sebagian besar responden bekerja sebagai petani atau buruh yang memang pendapatannya masih terbilang rendah.

E. Saran dan Usul Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

1. Saran dan Usul Masyarakat Terhadap Lokasi Pembangunan Kota Baru Lampung

Menurut Kepala Desa Karang Anyar Bpk. Suparmin mengatakan :

“Lokasi pembangunan Kota Baru Lampung di Kecamatan Jati Agung merupakan pilihan tepat karena dekat dengan pusat kota yakni Kota Bandar Lampung”.

Sedangkan menurut Kepala Desa Way Huwi Bpk. Asnawi mengatakan :

“Pemilihan lokasi pembangunan Kota Baru Lampung di Jati Agung merupakan pilihan tepat karena Jati Agung termasuk daerah yang cukup padat penduduknya tetapi diimbangi dengan luas wilayah yang juga besar”.

Jati Agung merupakan daerah yang cukup padat penduduknya tetapi juga memiliki luas wilayah yang cukup luas. Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung merupakan kebijakan untuk membangun sebuah kota diatas suatu lahan atau kawasan kosong dalam skala besar, sehingga memungkinkan untuk memenuhi semua aktivitas dan kebutuhannya sendiri. Selain itu juga Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dilakukan untuk mengalihkan pertumbuhan penduduk, serta mengurangi kemacetan lalu lintas yang ada di di Kota Bandar Lampung ke Kota Baru Lampung. Untuk itu lokasi Kota Baru Lampung harus memiliki wilayah yang luas untuk menampung kegiatan perkotaan.

2. Saran dan Usul Masyarakat Terhadap Alasan Pemerintah Provinsi Lampung Mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Menurut Kepala Desa Way huwi Bpk Asnawi mengatakan :

“Untuk mengatasi kepadatan penduduk dan mengurangi kemacetan lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung seharusnya juga dapat mempertimbangkan persoalan dana yang akan dikeluarkan dari adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung karena pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengatasi persoalan yang ada di Kota Bandar Lampung tentunya diharapkan tidak hanya memindahkan persoalan di Kota Bandar Lampung ke Kota Baru Lampung tetapi kebijakan tersebut dibuat karena kebutuhan di dalam mengembangkan wilayah sekitar Kota Bandar Lampung demi meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung”.

Sedangkan menurut Kepala Desa Karang Anyar Bpk. Suparmin mengatakan :

“Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan tidak merugikan masyarakat umum dan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dibuat untuk mengatasi persoalan kepadatan penduduk serta kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung, dan membantu mengembangkan daerah pinggiran kota sehingga mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Kota Bandar Lampung dengan daerah sekitarnya. Sehingga masyarakat pinggiran kota Bandar Lampung dapat merasakan langsung manfaat dari adanya kebijakan tersebut.

3. Saran dan Usul Masyarakat Terhadap Maksud Atau Tujuan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Menurut Bpk. Marsudi masyarakat Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati

Agung mengatakan :

“Pemindahan Ibukota Provinsi Lampung diharapkan dapat membuat pihak-pihak luar (swasta maupun asing) berinvestasi di kawasan Kota Baru Lampung”.

Sedangkan menurut Bpk Muhibin masyarakat desa Marga Agung

Kecamatan Jati Agung mengatakan :

“Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung, agar wilayah sekitar Kota Bandar Lampung dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan tidak menghilangkan ruang terbuka hijau yang dapat mengurangi polusi udara dan mencegah bencana alam dan berharap kebijakan tersebut dapat segera terwujud”.

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembangunan Kota Baru Lampung yakni pengembangan Kota Baru Lampung dibangun untuk membantu mengembangkan wilayah sekitar kota dan mengurangi beban kota induk dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, berwawasan pembangunan dan lingkungan yang asri dan lestari. Serta dapat menarik pihak swasta maupun pemerintah untuk berinvestasi demi mewujudkan Kota Baru Lampung agar dapat segera terealisasi.

4. Saran dan Usul Masyarakat Terhadap Manfaat Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Berdasarkan hasil riset menurut Kepala Desa Karang Anyar Bpk.

Suparmin mengatakan :

“Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan dapat bermanfaat bagi warga sekitar yakni menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan pemerintah demi memajukan daerah pengembangan Kota Baru Lampung. Dengan adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung menjadikan harga jual tanah di Kecamatan Jati Agung semakin tinggi sehingga masyarakat mengambil keuntungan dari hal tersebut”.

Selanjutnya menurut Bpk. Wasito masyarakat desa Marga Agung

Kecamatan Jati Agung mengatakan :

“Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung”.

Sesuai dengan rencana kebutuhan fungsi ruang pembangunan Kota Baru Lampung meliputi kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, permukiman, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya maka nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung. Masyarakat nantinya dapat merasakan langsung manfaat dari adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

5. Harapan Masyarakat Terhadap Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung.

Menurut Kepala Desa Karang Anyar Bpk. Suparmin mengatakan :

“Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung pada akhirnya diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari adanya pembangunan Kota Baru Lampung”.

Selanjutnya menurut Kepala Desa Way Huwi Bpk. Asnawi mengatakan :

“Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan dapat memperbaiki kehidupan ekonomi, pembangunan, sosial maupun politik masyarakat kawasan pengembangan Kota baru Lampung”.

Berdasarkan strategi pengembangan Kota Baru Lampung diantara adalah pendekatan konversi lingkungan (ruang terbuka hijau dan danau untuk peresapan air, mengalihkan pertumbuhan pada kota baru dan kawasan di luar kota Bandar Lampung, menciptakan peluang investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja baru, dan sebagainya. Sehingga pembangunan Kota Baru Lampung memiliki maksud atau tujuan yang positif dan diharapkan berdampak positif bagi masyarakat setempat.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden diketahui sebaran komponen pembentuk sikap politik masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yakni sebanyak 57 responden (57%) berada pada komponen kognitif, 28 responden (28%) berada pada komponen afektif, dan 15 responden (15%) berada pada komponen evaluatif. Responden yang memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan dengan responden yang memiliki perasaan maupun penilaian terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung, dikarenakan responden hanya sebatas mengetahui kebijakan tersebut yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sehingga masyarakat harus mau menerima kebijakan tersebut, dan dipahami sebagai kebijakan yang tidak dapat dirubah.
2. Sikap politik masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung umumnya mendukung. Diketahui sebanyak 71 responden (71%) berada pada sikap mendukung, 12 responden (12%) berada pada sikap menolak, dan sebanyak 17 responden (17%) berada pada sikap tidak peduli. Berkaitan dengan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap mendukung, menolak, maupun tidak peduli dari responden

mayoritas adalah berada pada komponen kognitif, dimana setiap individu memiliki persepsi sendiri di dalam menafsirkan atau memahami Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung yang diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, penciuman dan berbagai informasi yang ada, serta adanya kepentingan dari setiap individu yang bersangkutan untuk bersikap mendukung, menolak ataupun tidak peduli terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Selain itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian responden berada pada komponen kognitif, yakni faktor-faktor sosial yang berupa tingkat pendidikan, dan faktor ekonomi yang berupa tingkat pendapatan.

3. Saran dan usul masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung dapat disimpulkan :

a. Saran dan usul masyarakat terhadap lokasi Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Pemilihan lokasi pembangunan Kota Baru Lampung di Jati Agung merupakan pilihan tepat karena Jati Agung termasuk daerah yang cukup padat penduduknya tetapi diimbangi dengan luas wilayah yang luas. Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung merupakan kebijakan untuk membangun sebuah kota diatas suatu lahan atau kawasan kosong dalam skala besar. Untuk itu lokasi Kota Baru Lampung harus memiliki wilayah yang luas untuk menampung kegiatan perkotaan.

b. Saran dan usul masyarakat terhadap alasan Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Untuk mengatasi kepadatan penduduk dan mengurangi kemacetan lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung seharusnya juga dapat mempertimbangkan persoalan dana yang akan dikeluarkan dari adanya Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung karena pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Serta Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan tidak merugikan masyarakat umum dan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut.

c. Saran dan usul masyarakat terhadap maksud atau tujuan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung, agar wilayah sekitar Kota Bandar Lampung dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan tidak menghilangkan ruang terbuka hijau yang dapat mengurangi polusi udara dan mencegah bencana alam dan berharap kebijakan tersebut dapat segera terealisasi.

d. Saran dan usul masyarakat terhadap manfaat dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan dapat bermanfaat bagi warga sekitar yakni menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan pemerintah demi memajukan daerah pengembangan Kota Baru Lampung.

e. Saran dan usul masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung

Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung diharapkan dapat memperbaiki kehidupan ekonomi, pembangunan, sosial maupun politik masyarakat kawasan pengembangan Kota baru Lampung.

B. Saran

Masih adanya masyarakat yang bersikap menolak yakni sebanyak 11 responden (11%) dan masyarakat yang bersikap tidak peduli sebanyak 15 responden (15%) untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih pro aktif dalam mensosialisasikan dan meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan Kota Baru Lampung lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat sekitar kawasan pengembangan Kota Baru Lampung. Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung akan lebih efektif jika Pemerintah Provinsi Lampung dapat menyebarluaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat.